

**DAMPAK PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI  
UNTUK PEMBANGUNAN PROPERTI  
TERHADAP EKSISTENSI KAUM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANG UTARA)**

**Usulan Penelitian untuk Tesis S2  
Program Studi  
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

**Lilis Suryati, SH  
B4B000155**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**TESIS**

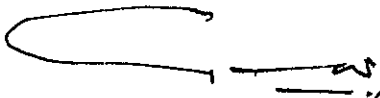
**DAMPAK PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI  
UNTUK PEMBANGUNAN PROPERTI  
TERHADAP EKSISTENSI KAUM  
( STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANG UTARA )**

Disusun oleh  
Lilis Suryati, SH  
B4B 000155

Telah dipertahamkan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 1 Oktober 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

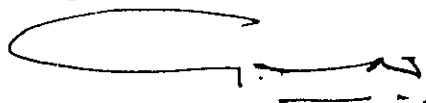
Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. IGN Sugangga, SH

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. IGN Sugangga, SH

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Oktober 2002



**LILIS SURYATI, SH**

## ABSTRAK

Pesatnya pembangunan perumahan di Sumatera Barat khususnya di Minangkabau menyebabkan nilai tanah menjadi naik sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat persekutuan Minangkabau terutama mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaumnya tidak lagi ikut memikirkan sosial ekonomi anggota kaumnya.

Banyaknya tanah pusaka kaum / pusaka tinggi yang telah beralih kepemilikannya oleh mamak dijual kepada pengusaha perumahan ( *Developer* ) mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota kaumnya. Dimana dalam peralihannya bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau, karena tanah pusaka milik semua anggota kaum dan bagi anggota kaum yang mengelola tanah pusaka hanya hak menikmati saja.

Dalam peralihan / penjualan tanah pusaka kaum / pusaka tinggi menimbulkan masalah sehingga adanya mamak kepala kaum digugat oleh anggota kaumnya , karena dalam penjualan tanah pusaka tersebut tidak semua anggota kaum diikutsertakan dan juga tidak dengan musyawarah dengan semua anggota kaum.

Banyaknya permasalahan tanah pusaka kaum di Minangkabau penulis tertarik melakukan penelitian. Untuk tesis penulis tentang masalah tanah pusaka di Minangkabau dengan judul “ Dampak Penjualan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum di Kota Padang ” dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Padang Utara dengan perumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pola prosedur melepaskan atau menjual tanah pusaka tinggi ?
2. Mengapa persekutuan hukum adat matrilineal / kaum di Minangkabau mau melepas tanah pusaka tingginya ?
3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap dijualnya tanah pusaka tinggi ?
4. Bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di kota Padang terhadap dijualnya / pelepasan tanah pusaka tinggi ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan – alasan penyebab persekutuan hukum adat / kaum menjual tanah pusaka tingginya pada *Developer*.
2. Untuk mengetahui syarat – syarat atau langkah apakah yang ditempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah pusaka tinggi dan bagaimana pola / prosedur peralihan atau pelepasan.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif akibat dijual / dilepasnya tanah harta pusaka tinggi bagi kaum yang bersangkutan maupun masyarakat luas di Minangkabau dari aspek sosial serta aspek ekonomi.
4. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat persekutuan adat di Minangkabau terhadap dijual / pelepasan tanah pusaka tinggi.

Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan *sociolegal research* dan bersifat deskriptif, teknik pengambilan sampling dalam bentuk purposif dan penentuan responden dengan menggunakan “ *Snowball Sampling* ” jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif dalam bentuk data primer

dengan tidak mengeyampingkan data sekunder. Data primer di peroleh dari responden di lokasi penelitian sedangkan data sekunder diambil peraturan – peraturan, dokumen makalah seminar, tambo dan sejenis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi oleh masyarakat adat alasannya sangat sederhana yaitu uang hasil penjualan tanah pusaka dibagi – bagikan pada anggota kaum untuk dijadikan modal usaha dan terserah anggota kaum dan daripada menimbulkan masalah dikemudian hari bagi anak kemenakan lebih baik dijual. Begitu juga pola peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi itu begitu mudah hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki mamak kepala kaum dan anggota kaum cukup memberi persetujuan kepada mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusaknya. Kadangkala diikuti dengan pemalsuan tanda tangan anggota kaumnya oleh mamak kaum.

Dampak dari penjualan tanah pusaka tersebut yaitu disisi lain pembangunan kota pesatnya sehingga sawah dan ladang telah berubah menjadi komplek perumahan dengan bangunan yang megah. Sedangkan disisi lain anggota kaum pemilik tanah semula menjadi terpinggir dan tergusur dari kampung halamannya sendiri, malah ada yang menyewa rumah di daerah lain yang rendah sewa rumahnya.

Tanggapan pemerintah kota terhadap banyaknya tanah pusaka yang dijual oleh persekutuan adat akibat dari pembangunan hal ini sangat memprihatinkan pemerintah daerah meskipun pemerintah daerah Sumatera Barat terlambat mengantisipasi eksekusi dari pembangunan kota dengan adanya undang – undang No. 22 tahun 1999 memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali pranata sosial yang selama ini terabaikan.

## ABSTRACT

A fast developing of housing in West Sumatra especially in Minangkabau causes the land price becomes higher, so that it influences the way of thinking of Minangkabau union society especially "mamak" the community chief, as a community chief she no longer thinks about the social economy of her community member.

A great number of community's heirloom land or great heirloom land that goes to other owner, sold by "mamak" to the housing entrepreneur (developer). Where the transition is against the Minangkabau's tradition because the heirloom land is the property of all community member and the community member who does the heirloom land only has the right to enjoy it.

The community's heirloom/ great heirloom land's transition/selling brings about problem so that the existence of "mamak" the community chief is being claimed by her community member, because not all community members are involved in the selling of the heirloom land, and there's no discussion with all community members.

The numerous amounts of problems about the community's heirloom land in Minangkabau make the writer interested to do a research. For the thesis about heirloom land in Minangkabau titled "The Impact of Great Inheritance Selling towards the Existence of Community in Padang City" by doing a case study in South Padang district with problems formulation as follows :

1. How is the procedure form to loose or to sell a great inheritance?
2. Why are matrilineal customary union willing to sell its great heirloom land?
3. What are the positive and negative impacts from the selling of great heirloom land?
4. How is the attitude of the city ruler and Minangkabau customary society, especially in Padang city, against the selling of great heirloom land?

The purposes of this research are :

1. To know the reasons that makes the customary/community union selling its great heirloom land to the developer.
2. To know the procedure to sell its great heirloom land.
3. To know the positive and negative impacts of the selling/loosing of great heirloom land either for the concerned society or the public in Minangkabau from social and economical aspects.
4. To know how the attitude of the city ruler and customary union society in

Minangkabau against the selling/loosing of great heirloom land.

Whereas the research method used in this research is sociological research and having a descriptive characteristic, the sampling technical is in purposive form and the respondent fixation is using snowball sampling, the data variety being collected is descriptive data in a primary data form without discarding secondary data. The primary data is obtained from the respondents in research area, whereas the secondary data is taken from regulations, seminar article document, history and others related to the research object.

From the research's result it is showed that in selling/ losing great heirloom land by the traditional community, the reason is very simple, that is the

money from the heirloom land selling is shared to the community members as a capital for working or as the community members like, and to avoid the rise of problems in the future for the nephew's/ niece's children, so it is better that it is sold. Likewise, the transition/ selling form of great heirloom land is so easy, only based on the competence of "mamak" the community chief to sell their heirloom land. Sometimes it is followed by falsification of the community member's signatures, done by the community chief.

The impact of the heirloom land selling is in other side the city development is so fast that the fields have been changed into housing with a splendour construction. On the other side, the community members who owned the land become dragged and sided from their own village, even some people rent a house in other area where the rent price is low.

The city ruler's reaction against the numerous amounts of heirloom land being sold by customary union because of the development makes the district ruler anxious, even though the West Sumatra district ruler is late to anticipate the impact of city development. The existence of the act No. 22 year 1999 gives a chance for the district ruler to rearrange the social norm which has been neglected so far.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmadNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir Program Magester Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis memilih Judul “ **DAMPAK PENJUALAN HARTA PUSTAKA TINGGI UNTUK PEMBANGUNAN PROPERTI TERHADAP EKSISTENSI KAUM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANG UTARA )** , disebabkan oleh struktur dan penguasaan tanah di Sumatera Barat mempunyai ciri khas yang berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di Kota Padang tidak lagi konsekwen / menghargai harta pusaka sebagai harta pusaka yang bersifat turun temurun, karena begitu mudahnya menjual tanah pusakanya, yang membawa dampak kepada eksistensi kaum itu sendiri.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. IGN SUGANGGA SH selaku Ketua Program Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas dukungan serta bimbingannya dalam menyusun tesis ini.
2. Tim Penguji yang telah memberikan koreksi untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



3. Bapak / Ibu Dosen di lingkungan Program Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan program pasca sarjana.
4. Suami tercinta KRESNA MENON SH dan anak – anak tersayang ANGEL FRESTIA KRESNA serta PAMELA KRESNA yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
5. Semua pihak yang telah membantu kelancaraan penulisan karya ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas budi baik serta melimpahkan rahmad dan memberkatiNya.

Amin

Semarang,

2002

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
ABSTRAK / INTISARI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bentuk dan Susunan Masyarakat Adat Minangkabau .....	11
2.2 Kedudukan dan Fungsi Harta Pustaka Tinggi .....	26
2.3 Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris terhadap Harta Pusaka dan Kaumnya .....	35
2.4 Harta Pusaka Tinggi dalam Perkembangan Pembangunan yang Mempengaruhi Perubahan Sosial .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Sifat Penelitian .....	54
3.2 Penentuan Sampel .....	54
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.4.1 Alat Pengumpulan Data .....	55
3.4.1.1 Peneliti Sendiri sebagai Instrumen Kunci .....	55
3.4.1.2 Buku Catatan .....	55
3.4.1.3 Alat Perekam .....	55
3.5 Teknik Analisis Data Bersifat Kwalitatif Analisis Domain .....	55
3.5.1 Analisis Taksonomis .....	55
3.5.2 Analisis Komponensial .....	55
3.5.3 Analisis Tema Cultural .....	156
3.6 Teknik Pengecekan Validitas Data .....	157

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	59
4.1.1 Monografi wilayah penelitian (Kota Padang) .....	59
4.1.2 Penjualan Tanah Pusaka Tinggi dan alasan Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Kaum dan anggota Kaum .....	64
4.2 Pola / Prosedur Peralihan / Penjualan Tanah Pusaka Tinggi .....	72
4.2.1 Bagi tanah yang telah bersertifikat ada pula 2 cara dalam peralihannya kepada developer .....	74
4.2.2 Bagi Tanah yang Belum Bersertifikat dengan cara .....	76
4.3 Tanggapan dari Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat .....	78
4.4 Dampak Positif dan Negatif terhadap dijualnya Pusaka Tinggi oleh kaumnya .....	80
4.4.1 Dampak Positif .....	80
4.4.2 Dampak Negatif .....	81
4.5 Analisis .....	84
4.5.1 Analisis terhadap Alasan-alasan Penjualan Tanah Pusaka Tinggi .....	84
4.5.2 Faktor Internal .....	85
4.5.2.1 Alasan Ekonomis .....	86
4.5.2.2 Alasan yang bersifat tanggung jawab moral anggota kaum terhadap pimpinan kaumnya .....	86
4.5.3 Faktor Eksternal .....	89
4.6 Analisis terhadap pola penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi .....	90
4.7 Analisis dampak positif dan negatif terhadap dijualnya tanah pusaka tinggi terhadap kaum .....	92
4.8 Analisis Tanggapan dari Tokoh Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat .....	95

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran – saran .....	102

## **RINGKASAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

- 1. Penggunaan Lahan Pertanian Dan Lahan Kosong  
Di Kotamadya Padang, 1990 ( Dalam Ha ) .....65**
- 2. Penggunaan Lahan Daerah Terbangun Menurut Jenis  
Perkecamatan Di Kota Madya Padang, 1990 ( Dalam Ha ) .....66**
- 3. Stándar Pengadaan Perumahan Di Kota Padang .....68**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tanah pada negara Indonesia yang agraris yang sebagian besar rakyatnya masih hidup dengan pertanian, tanah merupakan nilai tersendiri bagi pemiliknya, karena dari tanahlah dapat melangsungkan kehidupannya. Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tanah merupakan tempat untuk mendirikan bangunan / pemukiman, tempat untuk menjalankan usaha, tempat untuk memperoleh hasil usaha, bahkan tanah untuk tempat peristirahatan terakhir.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia dan adanya kecenderungan berkurangnya tersedianya tanah untuk pengembangan kota sehingga menjadikan nilai tanah semakin tinggi dan sangat penting serta menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi.

Kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan perumahan harus pula mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, dan oleh karena itu harus pula diadakannya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan orang perseorangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengabaikan tata ruang kota.

Sehubungan dengan perkembangan penduduk, akan kebutuhan perumahan terutama masyarakat perkotaan, sedangkan tanah / lahan tersedia sangat terbatas dan

juga kemampuan ekonomi masyarakat terbatas, maka pemerintah membentuk badan kebijaksanaan perumahan nasional dengan keputusan presiden No : 35 tahun 1974 yaitu BKPN, yang merupakan wadah koordinasi non structural yang dipimpin oleh menteri negara perumahan rakyat dan bertugas memecahkan persoalan yang timbul dibidang perumahan, membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah secara lebih terarah dan terpadu dibidang perumahan.

Dalam pelaksanaannya pengadaan tersebut dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan. Yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan pemukiman itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987. perusahaan pembangunan perumahan yang ingin memperoleh tanah untuk keperluan perusahaan terlebih dahulu harus mempunyai ijin lokasi dan luas tanah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a. Ijin lokasi yang luasnya tidak lebih dari 15 hektar bagi daerah tingkat II yang telah mempunyai rencana induk kota ditetapkan oleh Bupati / Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Ijin lokasi yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar ditetapkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I.

- c. Ijin lokasi yang luasnya lebih dari 200 hektar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri .

Selama belum diberikan penetapan ijin lokasi perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian / pembebasan tanah baik secara fisik maupun yuridis. setelah mendapat ijin lokasi dan luas tanah, perusahaan secara langsung akan melakukan pembebasan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 2 tahun 1976.<sup>1</sup>

Untuk merealisasikan kebijaksanaan tersebut, dikeluarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 02 / KPTS / 1990. Tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas kredit pemilikan kapling siap bangun dan kredit pemilikan rumah, yang dibiayai oleh bank – bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Akibat dari Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No: 02 / KPTS / 1990 yang memberi kesempatan pada perusahaan perumahan untuk mengembangkan usahanya maka bermunculan perusahaan perumahan (*developer*) di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Dimana *developer* tersebut berlomba - lomba untuk mendapatkan tanah seluas mungkin, kadang kala diikuti dengan persaingan harga yang cukup tinggi dan menggiurkan bagi pemilik tanah .

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, I Wayan Suandra, BA Manalu “ Dasar-Dasar Hukum Perumahan ” rineka Cipta, Jakarta Agustus 1990, hlm. 10 - 13

Sebagaimana diketahui bahwa umumnya pemilikan tanah – tanah yang luas di Sumatera Barat adalah tanah yang berasal dari Hak Milik Adat, baik berupa Tanah Hak Ulayat, Tanah Pusaka tinggi, maupun tanah pusaka rendah yang mana pemilikannya adalah secara komunal atau secara bersama dengan kaumnya. hal ini juga diakui oleh Undang - Undang Pokok Agraria Indonesia yaitu Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dalam Pasal 17 yang mengakui adanya sistem pemilikan bersama atau pemilikan secara komunal.

Masalah – masalah pertanahan merupakan permasalahan nasional selain tentang terbatasnya lahan, tetapi di Sumatera Barat juga mempunyai ciri yang khas, karena adanya struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat komunal sehingga dalam peralihan hak atas tanah, harus dengan persetujuan seluruh anggota kaum / suku. menurut ketentuan adat Minangkabau tanah pusaka atau isi lumbung / isi ampang puruk hanya boleh dikeluarkan dan dijual kalau terjadi sebab – sebab yang empat perkara :

1. *Rumah Gadang Katirisan* ( Rumah Gadang Ketirisan ).
2. *Mayik Tabujua Ditengah Rumah* ( Mayat Terbujur Ditengah Rumah ).
3. *Gadiah Gadang Alun Balaki* ( Gadiah Gadang Belum Kawin ).
4. *Mambangkik Batang Tarandam* ( Adat Pusaka Tidak Berdiri / Pengangkatan Seorang Datuk ).

Kalau bertemu dengan masalah dari salah satu empat perkara diatas maka *tidak Kayu Jenjang dikapiang, tidak emas bungkal diasah* artinya: kalau tidak ada



persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh digadaikan atau dijual.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya menurut masyarakat Minangkabau menjual atau memindahkan harta pusaka tinggi adalah suatu aib / malu besar bagi kaum, karena tanah pusaka tinggi fungsinya hanya untuk dinikmati dan bersifat turun temurun yang berasal dari nenek moyang, sehingga apabila ada suatu kaum yang menjual harta pusaka tinggi ada kepercayaan dalam masyarakat Minangkabau bahwa yang menjual mendapat kutukan dari nenek moyang yang telah mewariskan harta pusaka tersebut. Di samping itu, kaum tersebut juga mendapat hinaan dari masyarakat setempat.

Untuk diketahui menandakan apakah suatu kaum itu merupakan penduduk asli atau asal dari suatu wilayah di Minangkabau ditandai dengan adanya : Tanah Pusaka, Rumah Gadang / Rumah Asal, Pandam Perkuburan, sehingga masyarakat Minangkabau tidak mungkin untuk menjual tanah pusakanya, kecuali ada alasan yang memenuhi syarat tersebut di atas.

Menurut hukum adat Minangkabau struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah dikenal sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Mochtar Naim, "Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minang Kabau", Sri Dharma NV Padang 1968, hlm. 30

### 1. *Tanah Ulayat Nagari*

Adalah hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan Nagari. Biasanya tanah ulayat ini dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti untuk masjid dan sebagainya.

### 2. *Tanah Ulayat Suku*

Adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada ditangan Mamak kepala suku atau kepala kaum.

### 3. *Tanah Pusaka Tinggi*

Adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada ditangan mamak kepala kaum.

### 4. *Tanah Pusaka Rendah* adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya *Tanah Ulayat Nagari* maupun *Tanah Ulayat Suku* di beberapa Nagari di Sumatera Barat ( masyarakat adat Minangkabau ) hampir punah, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya lahan untuk perkebunan besar seperti perkebunan kelapa sawit atau pembukaan lahan untuk Transmigrasi sehingga tanah

---

<sup>3</sup> Sajuti Thalib, "Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau", Bina Aksara 1985, hal. 4-5.

ulayat tersebut telah beralih kepemilikan dan fungsinya. Sekarang yang masih ada, Tanah Harta Pusaka Tinggi dan Tanah Pusaka Rendah ,akan tetapi karena pengaruh sosial ekonomi , tanah – tanah tersebut telah banyak pula yang berpindah tangan .

Di Kodya Padang berdasarkan pengamatan penulis tanah harta pusaka tinggi yang akan merupakan obyek penelitian tesis ini telah banyak beralih menjadi areal perumahan yang dibangun *developer*, meskipun masih ada kaum yang mempertahankan tanah harta pusaka tinggi. Akan tetapi, karena penawaran yang cukup tinggi uang yang banyak oleh *developer*, mengakibatkan atau mempengaruhi pola pikir mamak kepala waris dari suatu kaum digugat ke Pengadilan Negeri oleh anggota kaum atau kemenakannya karena mamak kepala waris tidak mengikut sertakan anggota kaumnya secara keseluruhan dalam menjual tanah pusaka tinggi .

Pembangunan perumahan oleh *developer* mengakibatkan banyaknya tanah harta pusaka tinggi beralih pihak ketiga atau pihak lainnya. Hal ini akan membawa dampak selain makin habisnya tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu kaum, juga akan mempengaruhi terhadap struktur sosial dan pola pikir masyarakat Minangkabau yang semula sangat kental solidaritas yang tinggi sekarang sudah mulai bersifat individu dan keluarga besar menjadi keluarga inti.

Tanah harta pusaka tinggi merupakan perekat kekeluargaan dari suatu kaum, hal tersebut dapat dilihat dari fungsi harta pusaka itu sendiri, dimana yang menikmati hasil adalah anggota kaum yang perempuan dan yang laki-laki terutama mamak kepala waris hanya mengawasi peruntukan serta kegunaannya untuk kesejahteraan

anggota kaumnya dan *mamak kepala waris* juga berperan mewakili harta badan hukum ( kaum ) itu kedalam dan keluar pengadilan.<sup>4</sup>

Contoh: sawah atau ladang milik dari suatu kaum dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh anggota kaum ( baik laki – laki maupun perempuan ) dan hasilnya dibagi oleh *mamak kepala waris* pada masing – masing *Paruik* ( keturunan perempuan yang ada dalam kaum tersebut ) atau dipergunakan untuk keperluan memperbaiki *rumah gadang / rumah asal*, untuk mengawinkan kemenakan perempuan, untuk menebus harta pusaka yang tergadai dan untuk *Batagak Datuak*.

Di Minangkabau suatu beban atau masalah dipecahkan secara bersama -sama / secara gotong royong, pepatah adat mengatakan :

*Barek samo dipikua, ringan sama dijinjing.*

*Kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun.*

Dengan makin habis atau punahnya harta pusaka tinggi sehingga nilai-nilai dari masyarakat adat yang sebelumnya bersifat komunal dengan solidaritas yang tinggi menjadi masyarakat yang bersifat individu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sekarang, khususnya diperkotaan, yang dahulunya pesta perkawinan di rumah gadang / rumah asal, sekarang tidak ada lagi, karena untuk mengawinkan kemenakan perempuan tidak lagi menjadi tanggung jawab paman ( saudara laki laki ibu ), dan sudah menjadi tanggung jawab ayah dan juga biaya perkawinan tidak lagi berasal dari harta pusaka tinggi.

---

<sup>4</sup> Seminar Hukum Tanah dan Hukum waris Minangkabau di Padang 1968 dan di Jakarta 1983.

## 1.2. Permasalahan

Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang semakin mendesak sejalan dengan pertumbuhan penduduk terutama diperkotaan secara langsung akan berhadapan dengan kebutuhan akan tanah atau lahan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan perumahan bagi *Developer* atau pengembang khususnya di Kota Padang akan berhadapan dengan tanah adat terutama tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu kaum, sedangkan tanah perorangan atau pribadi, luasnya sangat terbatas.

Sebagaimana diuraikan diatas tanah harta pusaka tinggi tidak mungkin dialihkan karena hal tersebut merupakan aib atau rasa malu bagi kaumnya kecuali dalam hal yang telah ditentukan secara limiatif dan itupun harus disetujui seluruh anggota kaum. Akan tetapi karena pengaruh pola pikir dan ekonomi maka telah banyak tanah harta pusaka tinggi yang beralih atau dijual menjadi lahan perumahan pada *Developer* / pengembang, dan akhirnya dimiliki oleh perorangan baik secara tunai maupun kredit.

Dalam hal ini akan dirumuskan permasalahan yang akan menjadi penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa persekutuan hukum adat matrilineal / kaum di Minangkabau khususnya kota Padang mau menjual tanah harta pusaka tingginya ?
2. Bagaimana pola / prosedur menjual tanah pusaka tinggi tersebut ?
3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap dijualnya tanah harta pusaka tinggi ?

4. Bagaimana sikap pemerintah kota Padang dan masyarakat hukum adat Minangkabau, khususnya dikotamadya Padang terhadap dijualnya tanah pusaka tinggi ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penyebab persekutuan hukum adat/kaum menjual tanah harta pusaka tingginya pada *Developer/* pengembang.
2. Untuk mengetahui syarat – syarat atau langkah apakah yang ditempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah harta pusaka tinggi dan bagaimana pola / prosedur penjualan tanah harta pusaka tinggi.
3. Untuk mengetahui dampak – dampak apa yang terjadi akibat dijualnya/ dilepasnya tanah harta pusaka tinggi, baik bagi kaum yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas di Minangkabau ditinjau dari aspek sosial, serta aspek ekonomi.
4. Bagaimana sikap pemerintah kota Padang daerah / Pemda dan masyarakat hukum adat di Minangkabau khususnya Kota Padang terhadap dijualnya tanah harta pusaka tinggi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dari aspek keilmuan dan praktisnya dari dalam masyarakat matrilineal ( Minangkabau ) terhadap keberadaan tanah harta pusaka tinggi khususnya Kodya Padang.
2. Hasil penelitian tentang alasan – alasan untuk untuk menjual harta pusaka tinggi diluar ketentuan hukum adat Minangkabau yang dapat dijadikan alasan pembenar lainnya dan dapat diterima oleh masyarakat adat Minangkabau.
3. Dengan mengetahui dampak terhadap dijualnya tanah harta pusaka tinggi akan dipergunakan sebagai pedoman atau acuan untuk menentukan sikap masyarakat Minangkabau apakah tanah harta pusaka tinggi masih harus di pertahankan dan bagaimana mengelola hasil penjualan tanah harta pusaka tinggi yang bermanfaat bagi kaum tersebut sehingga walaupun dijual tanah harta pusaka tinggi masih ada perekat antara anggota kaum.
4. Untuk mengetahui tanggapan dari Pemerintah Kota Padang dan masyarakat persekutuan adat Minangkabau.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya Sistematika Penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dan isi tesis yang ditulis .

##### **Bab I Pendahuluan**

Akan memuat didalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

## Bab II Tinjauan Pusaka

Akan membicarakan topografi persekutuan masyarakat adat Minangkabau, pandangan dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau serta landasan adat tentang pengaturan penguasaan tanah secara bersama dan konsep pemilikan dan penguasaan tanah di Minangkabau kemudian menjelaskan mengenai pengertian harta pusaka tinggi, fungsi dan kegunaan harta pusaka tinggi, syarat - syarat peralihan harta pusaka tinggi serta peranan dan fungsi mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum. Selain itu akan dibahas juga mengenai perkembangan sosial masyarakat yang mempengaruhi perubahan pola struktur masyarakat Minangkabau.

## Bab III Metode Penelitian

Akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan sosiolegal research, penentuan sample, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan validitas data.

## Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi alasan anggota kaum / *Mamak Kepala Kaum* menjual harta pusaka tingginya, cara peralihan / pelepasan harta pusaka tingginya kepada perusahaan properti, ketentuan daerah setempat yang harus ditaati oleh properti, berapa luas tanah yang diberi ijin lokasi oleh pemerintah daerah, cara mendapatkan ijin lokasi dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh



perusahaan properti, serat dokumen apa saja yang diperlukan. Bab ini akan diakhiri dengan membicarakan, tentang dampak pembangunan properti terhadap dijualnya harta pusaka tinggi terhadap kaum tersebut, aspek sosial dan aspek ekonomi.

## Bab V Penutup

Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran - lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan atas hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Bentuk dan Susunan Masyarakat Adat Minangkabau**

Minangkabau terkenal dengan sistim kekerabatan yang bersifat matrilineal dimana garis keturunan ditarik menurut garis ibu ( suku ibu ), daerah ini terletak di wilayah Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang. Secara geografis letak wilayah ini memanjang dari barat laut tenggara yang membujur di pesisir barat pulau Sumatera, terletak antara  $00^{\circ} 55'$  Lintang Utara sampai dengan  $02^{\circ} 35'$  Lintang Selatan dan  $99^{\circ} 10'$  Bujur Timur sampai dengan  $101^{\circ} 55'$  Bujur Timur ( tidak termasuk kepulauan mentawai ). Pengertian Minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosio - kultural. Sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif, dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam geografis administratif Sumatera Barat.

Wilayah alam Minangkabau asli menurut literatur tradisional Minangkabau dalam Tambo adat alam Minangkabau dibagi atas Luhak nan Tigo yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluh Koto, yang oleh masyarakat Minang disebut “ *darek* ”. Sedangkan untuk daerah lainnya disebut Rantau yang merupakan perluasan wilayah setiap luhak.

1. Rantau Luhak Agam meliputi dari pesisir Barat mulai Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikapiang dan Pasaman.
2. Rantau Luhak Limo puluh Koto meliputi Bangkinang lembah Kampar kiri dan Kampar kanan dan Rokan.
3. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubang tiga belas , pesisir Barat / Selatan dari Padang sampai Inderapura, Kerinci dan Muaro labuh.

Jika ditarik garis batas daerah Minangkabau asli dengan daerah rantau, akan terlihat bahwa batas - batas yang dikemukakan dalam tambo, telah mencakup semua Daerah Tingkat II ( Kabupaten ) yang terdapat di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limo Puluh Koto, Pasaman , Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung.<sup>5</sup>

Mengenai bentuk dan susunan organisasi sosial masyarakat Minangkabau adalah persekutuan hukum disebut Nagari, setiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai anggota masyarakat sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat nagari. Tiap - tiap nagari terdiri atas empat suku dan tiap - tiap suku mempunyai tata susunan yang tetap terdiri dari beberapa bagian yang disebut :

1. Rumah Gadang atau paruik / jurai, bagian dari paruik, ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak - anaknya ( laki-laki dan perempuan ) samande.

---

<sup>5</sup> Irma Setyowati Soemitro, SH " Beberapa aspek kewarisan pada kekerabatan matrilineal " Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1994, hal.2 - 3

2. Pengurus persekutuan hukum di ketuai oleh seorang penghulu andiko, sedangkan paruik / jurai dikepalai oleh seorang *Tungganai / Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Kaum*.
3. Harta pusaka diurus oleh *Penghulu Andiko* dan harta pusaka tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwariskan pada seorang anggota kerabat yang bersangkutan, hanya boleh dinikmati tetapi tidak boleh dimiliki. Hak menikmati dari kerabat itu disebut "*Ganggam Bauntuak*" dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya pada pihak lain atau suku lain.<sup>6</sup>

Jika disusun unit-unit organisasi sosial tersebut diatas secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka susunannya akan terlihat sebagai berikut:

1. Samande .
- 2 .Paruik.
- 3 .Suku.
- 4 .Nagari.

Semua kesatuan semenjak dari Samande, Saporuik, suku adalah merupakan unit geneologis sedangkan Nagari merupakan unit teritorial. Sehingga masyarakat hukum Minangkabau disebut bersifat geneologis teritorial, karena warga masyarakat tersebut hidup bersama dalam wilayah / ulayat tertentu merasakan adanya pertalian darah antara sesamanya. Sedangkan tata susunan nagari ini ada dua macam yang lahir menurut ajaran kedua ninik moyang yang pemimpin orang Minangkabau yaitu: *Datuk*

---

<sup>6</sup> Surojo Wignjodipuro, SH " Pengantar Asas – Asas Hukum Adat ." hal. 73

*Ketumenggungan* ( Koto Piliang) dan *Datuk Perpatih Nan Sabatang* (Bodi Caniago), masing - masing ninik moyang itu pemimpin dalam Kelarasannya sebagai berikut :

1. Ditanah Agam berlaku adat Bodi Caniago dimana pimpinan nagari terletak ditangan permufakatan para penghulu andiko yang sederajat kedudukannya dan dibantu oleh imam khatib serta orang banyak di nagari, Balairungnya dibangun datar. Karena Laras Bodi Caniago menganut prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi ( sistem demokrasi ) dengan semboyannya mambasuik dari bumi ( membersit dari bumi ).
2. Didaerah Koto Piliang ( Tanah datar dan Limo puluh Koto ) para Paruik yang tergabung dalam apa yang dinamakan “ Kampuang ” ( Kampung ) bersatu dalam perikatan yang disebut suku, tiap suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut Penghulu Andiko yang merupakan kepala paruik yang terkemuka dari kampung dan mempunyai kekuasaan yang mandiri. Pucuk pimpinan di pegang seorang penghulu pucuak ( penghulu pucuk ) yang selalu bermusyawarah dengan para penghulu andiko dari suku - suku di kampung, ia dibantu oleh tiga orang yang dihormati dalam masyarakat yaitu:
  1. Untuk urusan pamong praja disebut Manti.
  2. Untuk urusan polisi praja disebut Dubalang.
  3. Untuk urusan Agama disebut Malin.

Bentuk Balairungnya mempunyai anjung yang bertingkat dua, karena suku koto piliang menganut prinsip “ Berjenjang naik, bertangga turun. ( sistem otokratis) dengan semboyannya titie dari ateh ( titik dari atas ).

Dalam perkembangannya dewasa ini kedua sistem ini tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana orang yang menganut sistim Koto Piliang dan mana yang menganut sistim Bodi Caniago. Secara umum kedua sistim itu telah berlaku secara campuran, yang saling isi - mengisi. Bahkan kenyataannya dalam kehidupan sehari - hari lebih condong menurut sistim Bodi Caniago yang demokratis dimana prinsip musyawarah dan mufakat diamalkan sebaik-baiknya dalam tiap proses pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Dalam penataan berbagai segi kehidupan masyarakat Minangkabau berpegang kepada Adat, Syarak, dan undang-undang, yang dikenal dengan tali bapilin tigo ( tali berpilin tiga ) merupakan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Maknanya hukum adat bersendikan kepada Syarak ( syariat islam ).

Syariat yang bersendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai kedalam adat. Dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam, ia selalu bisa dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat menjadi suluh penerang.

---

<sup>7</sup> Penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, 1979 hal.13

Sedangkan adat itu sendiri terbagi atas empat macam adat , yaitu:

1. Adat nan sabana adat.
2. Adat nan diadatkan.
3. Adat nan teradat.
4. Adat istiadat .

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah - ubah.<sup>8</sup> Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Qur'an serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau disebut juga dengan adat yang datang dari Allah Ta'ala.<sup>9</sup>

Adat nan sabana adat ini pada hakekatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat - ayat Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul karim maupun dalam hadits - hadits Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat - ayat Allah yang Dia tebarkan didalam alam semesta termasuk diantaranya adalah Sunnatullah atau ketentuan-ketentuan / hukum alam yang meliputi jagat raya. Adat nan sabana adat ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang di katakan

---

<sup>8</sup> Chairul Anwar, " Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau." Rineka Cipta Jakarta 1997 hal. 5 - 6

<sup>9</sup> Ibid, hal 57

“ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai ”  
( syarak mengata, adat memakai ).<sup>10</sup>

*Adat nan diadatkan* ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk ketumenggungan beserta Datuk perpatih nan Sabatang. Menurut anggapan masyarakat Minang adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah ” Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan ”.<sup>11</sup> Adat nan diadatkan ini disusun oleh nenek moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya, yang ungkapkan dalam pepatah Minang ” Alam takambang jadi guru “ ( alam berkembang jadi guru ).<sup>12</sup>

*Adat nan teradat* ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu - penghulu ninik mamak ditiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan / hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sehingga aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya disetiap nagari Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi “ lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo ” artinya, aturan pelaksanaan disetiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain.

---

<sup>10</sup> Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, “ Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Remaja Rosda Karya, Bandung 1997, hal. 30

<sup>11</sup> Chirul Anwar, Op cit, hal.57

<sup>12</sup> Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, Op cit, hal. 105



Walaupun berdeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya.<sup>13</sup>

*Adat istiadat* ialah, juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu - penghulu dinagari - nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.<sup>14</sup>

Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan dalam sebutan sehari - hari disebut “adat”, sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan sehari-hari disebut “istiadat”. Keempat macam adat tersebut diatas oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu “adat istiadat Minangkabau”.

Dari keempat macam adat diatas menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu:
  - a. Adat nan sabana adat.
  - b. Adat nan diadatkan.

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 110

<sup>14</sup> Ibid, hal 112

aia ( tidak lekang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan, dikikis sehabis besi.dan dicuci sehabis air ). Ungkapan tersebut menyiratkan akan ketegasan dan kekukuhan adat tersebut , sehingga ada keharusan mutlak untuk mematuhiinya .

2. *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh diubah dengan musyawarah, yaitu:

a.Adat nan teradat.

b.Adat istiadat.

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.<sup>15</sup>

Uraian diatas memberikan makna bahwa ada ketentuan - ketentuan dari adat yang tidak dapat di tawar - tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam pola perilaku sosial dan mesti hidup dalam masyarakat Minangkabau, serta tidak dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan.

Menurut pendapat Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu ( tokoh adat Minangkabau ) hanya adat nan babuhua sentak, yang memberikan kesempatan perubahan. Sedangkan pendapat DR Chairul Anwar justru yang memberikan kesempatan dan peluang untuk terjadinya perubahan adat adalah dari adat nan babuhua mati, khususnya terhadap adat nan diadatkan. Sifat keabadian ( babuhua mati ) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 113 - 114

<sup>16</sup> Chairul Anwar, Op cit, hal. 57

Sebagaimana uraian diatas adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh dua orang bersaudara dan dipercaya sebagai nenek moyang orang Minangkabau, yaitu Dt Perpatih nan Sabatang dan Dt Ketumenggungan, adat mana merupakan hasil inspirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk pepatah, petiti, gurindam, mamang, bidal, pantun dan sebagainya, karena peraturan - peraturan itu diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.<sup>17</sup> Sehingga membutuhkan rasa dan perasaan serta fikiran, dalam menangkap makna dari ketentuan adat nan sabana adat. Kemudian masuk Islam ke Minangkabau, adat yang semula bersumber dari alam berkembang jadi guru, sehingga mendapat tempat dan menyatu dalam adat Minangkabau, karena ajaran Islam mengandung banyak perintah untuk belajar kepada alam. Dalam perjalanan waktu berikutnya ajaran Islam menyempurnakan adat Minangkabau, sehingga ditarik keurutan pertama landasan adat yaitu adat nan sabana adat. Sedangkan adat nan diadatkan ditempatkan pada urutan kedua, dan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang susunan masyarakat, dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil yang disebut harta pusaka tinggi.

Undang - undang yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam berintegrasi sesamanya terdiri dari empat bagian meliputi :

- a. Undang - undang luhak / rantau.

---

<sup>17</sup> Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, Op cit, hal. 17

- b. Undang - undang nagari.
- c. Undang - undang didalam nagari.
- d. Undang - undang nan duo puluh.

Undang-undang luhak / rantau dituangkan didalam ungkapan adat “ Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo ” ( luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja ). Segala ketentuan yang di buat penghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal.

Undang-undang nagari merupakan aturan - aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap - tiap nagari, yang melambangkan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarakat antara lain harus:

- Balabuah ( jalan raya ), batapian ( bertepian / tempat mandi ), lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi.
- Bapasa ( berpasa ), bagalanggan ( berdagang ), lambang kemakmuran Basawah ( punya sawah ), baladang ( punya ladang ), bahwa nagari harus berdiri dalam bidang sandang dan pangan.
- Bamusajik ( bermesjid ), bapandam pakuburan ( berpendam perkuburan ), lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat yang kuat memegang adat dan taat menjalankan agama.

Undang - undang dalam nagari adalah ketentuan - ketentuan yang mengatur masyarakat setiap nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti:

- Salah cotok malantiangkan ( salah cotok memperlantingkan )

- Salah ambiak mangumbalikan ( salah ambil mengembalikan )
- Kaba baik baimbauan ( kabar baik dihimbaukan ).
- Kaba buruak baambauan ( kabar buruk berhamburan )

Undang-undang nan duo puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang dipakai dalam rapat nagari untuk memutus hukum terhadap orang yang bersalah, melanggar adat istiadat dengan melihat kesalahan kecil dan kesalahan besar, yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis, diantaranya:

- a. Rebut - rampas.
  - b. Tikam - bunuh.
  - c. Sumbang - salah.
- Merebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang yang punya, sedangkan orang yang bersangkutan tidak tahu, ketika barangnya sudah direbut orang, yang punya tercengang - cengang.
  - Merampas ialah mengambil barang orang lain dengan kekerasan, sedangkan orang yang punya tahu, lalu terjadi bertegang - tegangan. ( tarik-menarik ).
  - Tikam ialah melukai dengan senjata tajam.
  - Bunuh ialah menganiaya seseorang sampai mati, baik dengan senjata maupun dengan usaha lain.
  - Sumbang ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu kejanggalan.

- Salah ialah perbuatan yang dilakukan seseorang jelas – jelas telah melanggar ketentuan adat. Keempat undang - undang diatas oleh masyarakat Minangkabau disebut dalam ungkapan “ undang - undang nan ampek ”.

## **2.2. Kedudukan dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi.**

Pada hakekatnya harta pusaka merupakan objek hukum waris, harta pusaka pada masyarakat matrilineal Minangkabau ada dua bentuknya yaitu:

1. Sako ( immaterial ).
2. Harta pusaka ( material ).

Sako adalah gelar pusaka yang melekat pada suku yang diterima secara turun - temurun dari kaumnya oleh seorang kepala suku ( penghulu ) yang diatur kedudukannya menurut kelarasan adat Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang ditiap - tiap nagari.

1. Gelar sako ini hanya disandang oleh kaum laki - laki saja dari anggota kaumnya dan diturunkan kepada kemenakan yang laki - laki, jika mamak bergelar “ Datuk Mantari Alam ”, maka kemenakannya yang akan jadi penghulu bergelar “ Datuk Mantari Alam ” juga.
2. Harta pusaka adalah segala harta yang berupa tanah - hutan, sawah - ladang, rumah - gadang, pandam - perkuburan. Yang sudah lama diwariskan secara turun-temurun dalam keadaan yang sama, dan dikuasai oleh kaum perempuan.

Kedua harta tersebut hanya boleh diwariskan melalui pola hubungan mamak-kemenakan menurut garis keturunan ibu, seperti pepatah adat:

- Dari Ninik turun ke Mamak.

- Dari Mamak turun ke kemenakan.

Di Minangkabau bentuk hubungan Mamak - kemenakan ini ada empat macam yaitu:

1. Hubungan mamak - kemenakan dibawah daguak.
2. Hubungan mamak - kemenakan dibawah dado.
3. Hubungan mamak - kemenakan dibawah paruik / pusek.
4. Hubungan mamak - kemenakan dibawah lutuik.

Kemenakan dibawah daguak adalah kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kemenakan dalam kelompok ini sering juga dengan kemenakan batali darah ( kemenakan bertali darah ).

Kemenakan dibawah dado adalah golongan kemenakan yang mempunyai hubungan suku yang sama dalam satu kanagarian, namun penghulu suku berbeda. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan kemenakan batali suto ( kemenakan bertali sutra ).

Kemenakan dibawah paruik / pusek ( paruik / pusar) adalah golongan kemenakan yang mempunyai suku yang sama tetapi berbeda kanagarian . kemenakan kelompok ini di sebut juga dengan kemenakan batali ameh ( kemenakan bertali emas ).

Kemenakan di bawah lutuik ( lutut ) adalah kelompok orang datang berasal dari suku dan nagari yang berbeda, karena hubungan baik sehingga diakui sebagai kemenakan. Mereka digolongkan orang yang “ hinggok mancakam, tabang basitumpu ” ( hinggap mencengkeram, terbang bersitumpu ), karena minta diakui

sebagai kemenakan dalam suku. Kelompok ini disebut juga kemenakan batali budi ( kemenakan bertali budi ).

Dengan banyaknya bentuk kemenakan seperti yang disebut diatas, maka sedikit sekali kemungkinan suatu harta pusaka akan berpindah kesuku lain / pihak lain.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau umumnya berupa tanah, karena nenek moyang masyarakat Minangkabau menyadari bahwa tanah sangat mempunyai nilai ekonomis yang strategis, oleh sebab itu ia selalu mempertahankan dan tidak boleh diperjual belikan. Pada dasarnya tujuan untuk mempertahankan harta pusaka tinggi secara utuh agar dapat menjamin kelangsungan hidup kaumnya dan demi tercapainya kesejahteraan atau sandaran ekonomi anak - kemenakan dikemudian hari, disamping itu juga menjadi simbol status sosial dalam masyarakat . Keaslian suatu kaum itu sering melekat pada keberadaan harta pusaka itu , karena untuk mengetahui suatu kaum itu merupakan penduduk asli / asal dari suatu wilayah di Minangkabau ditandai dengan adanya tanah pusaka, rumah gadang / rumah asal, pandam perkuburan yang dimiliki oleh suatu kaum tersebut.

Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah pusaka sendiri meskipun mereka mempunyai tanah "tembilang emas " ( tanah yang dibeli / dipagang) maka keadaan itu tidak menentukan bahwa mereka penduduk asli, melainkan disebut sebagai " orang pendatang " yang sering dipandang rendah sukunya oleh suku lain. Pada masyarakat Minangkabau tanah merupakan faktor pengikat diantara mereka , karena tanah pusaka merupakan daerah / wilayah bagi seorang penghulu tempat berkembang



dan hidup kaum yang dipimpinnya, jika harta pusaka itu dijual maka kaum yang berkembang diatas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya.

Walaupun pada prinsipnya tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjual-belikan / dialihkan namun dalam situasi mendesak, sesuai pula dengan prinsip kesejahteraan kaum, maka tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual kalau terjadi sebab - sebab yang empat perkara yaitu:

1. Rumah gadang ketirisan ( rumah gadang ketirisan ).
2. Mayik tabujua ditengah rumah ( mayat terbujur di tengah rumah ).
3. Gaduh gadang tak balaki ( anak gadis belum kawin ).
4. Mambangik batang tarandam ( menegakkan gelar pusaka ).

Jika terjadi salah satu dari yang empat perkara tersebut diatas, maka “ ndak kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah ” ( tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emas batu diasah ). Artinya: Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh dijual atau digadaikan. dengan ketentuan :

- Sepakat seluruh anggota kaum.
- Seizin anggota kaum yang dewasa.
- Seizin anggota kaum yang dirantau.

Bila tidak satupun muncul peristiwa diatas, lantas pemegang pimpinan kaum ( mamak kepala kaum / tungganai ) menjual atau dilakukan peralihan hak, maka yang melanggar adat akan terkena sumpah pasitiran ” Kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah digiriak kumbang ” yaitu kutukan dari nenek moyang yang

telah mewariskan harta pusaka tersebut. Orang yang terkena sumpah pasitiran hidupnya merana tak berguna ibarat sebatang pohon kayu yang tumbuhnya, keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berurat, ditengah batang dilobangi kumbang. Sumpah pasitiran ini hanya akan menimpa mereka yang menjual atau mengalihkan harta pusaka tinggi dengan cara - cara melanggar adat, tetapi tidak terhadap mereka yang melakukannya berdasarkan alur dan patut ( ketentuan adat ).

Hubungan hukum antara anggota kaum dengan tanah pusaka atau tanah bersama itu melahirkan hak ulayat atas tanah itu, tanah demikian dinamakan tanah ulayat dari kaum ( harta pusaka tinggi ).<sup>18</sup>

Jika ditinjau dari asal-muasal harta pusaka yang dapat dipusakai ahli waris menurut pendapat Sajuti Thalib struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah empat macam:

1. Tanah Ulayat Nagari.
2. Tanah Ulayat Suku.
3. Tanah Pusaka Tinggi.
4. Tanah Pusaka Rendah.

*Tanah Ulayat Nagari* adalah Hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Biasanya tanah ulayat ini dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti untuk mesjid dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Tasrif Ali Umar, Faisal Hamdan, "Linggunagan Tanah di Sumatera Barat ." 1977 – 1978 hal. 241

*Tanah ulayat suku* adalah tanah yang dikelola dan hanya anggota suku ini yang memperoleh dan menggunakan tanah tersebut.

*Tanah pusaka tinggi* adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun - temurun, yang pengawasannya berada ditangan mamak kepala kaum / kepala waris.

*Tanah pusaka rendah* adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruiik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai keluarga berdasarkan pencahariannya , pembelian, taruko dan sebagainya.

Sedangkan pendapat Hermayulis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau, ia membedakan berdasarkan faktor geneologis dan faktor geneologis territorial. Dilihat dari faktor geneologis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu pertama; tanah berstatus pusaka tinggi kedua; tanah berstatus pusaka rendah ( rendah ). Tanah berstatus pusaka tinggi ini tidak boleh dipindah tangankan dari satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus ,dan selalu dilakukan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan . Harta pusaka tinggi ini merupakan kepunyaan kaum dan akan dipunyai secara bersama – sama oleh semua kaum, semua berhak atas harta itu .Tanah pusaka tinggi ini diawasi oleh Mamak Kepada Waris dan dipelihara oleh penghulu.

Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah) yang didapat dari pewarisan harta pencaharian atau cancang latiah dan tarukoi ( mengubah tanah kosong atau resnulis ) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk kelompok ini adalah

harta yang baru mengalami pewarisan di bawah tiga tingkatatan generasi . Harta pencaharian ( self earned property ) akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi ke atas. Sedangkan harta cancang latiah diantaranya didapat dari hasil usaha di rantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka diatas terlihat bahwa mamak kepala waris dan penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya .

Dilihat dari faktor geneologis - territorial, maka bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah adalah sebagai berikut .

1. Manah ( ulayat ) nagari , yaitu seluruh wilayah ( tanah ) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo ( rimba ) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut . Masyarakat terikat pada hutan jauh baulang - hutan dakek bakundanoi, Tanah yang pernah diolah tetapi pernah ditinggalkan ( verlaten ground ) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari, Tanah yang selalu dihuni atau diolah secara terus menerus oleh anggota suku dengan kata lain mana ( ulayat ) nagari merupakan gabungan dari manah suku.
2. Manah suku, yaitu semua wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun di bawah anggota secara turun temurun di bawah pengawasan penghulu pucuk atau penghulu andiko secara bersama-sama baik tanah tersebut merupakan penemuan dari tanah

tak bertuan, cancang latiah baik dengan melakukuan tarukom atas manah nagari, gadang menyimpang dimana tanah tersebut berada dibawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.

3. Manah kaum , yaitu seluruh wilayah dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah pengawasan penghulu atau datuk dalam kaum-nya . tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang menyimpang dari suku asal . Tanah ini diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah pengawasan dan pemeliharaan tungganai.
4. Manah paruik , yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruik .Manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat kaum karena gadang menyimpang atau karena hasil penemuan atau okupasi terhadap daerah baru.
5. Manah keluarga inti ,yaitu tanah yang dikuasai suatu bagian dari paruik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian ,taruko dan sebagainya.

Dengan demikian, disamping terdapatnya hak ulayat yang diwariskan oleh kelompok masyarakat matrilineal baik dalam jumlah besar seperti nagari, maupun dalam kelompok jumlah yang lebih kecil seperti kaum, yang diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kelompok masing - masing. Dari diskripsi diatas dapat pula ditarik pengertian dan ciri - ciri dari harta pusaka tinggi sebagai berikut:

Harta pusaka tinggi ( tanah ), ialah tanah keluarga tertentu yang telah turun - temurun dari nenek moyangnya yang perempuan, terus turun kebawah sampai pada

generasi berikutnya selalu melalui garis ibu, bagi perima harta itu sudah kabur asal usulnya. Karena sudah begitu tua umur harta pusaka tinggi itu, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ialah, pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang mengusahakannya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu sudah bercampur baur dengan sumber lain yang kemudian. Harta pusaka tinggi tidak pernah menjadi harta pusaka rendah, tetapi harta pusaka rendah diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi. Penulis sependapat dengan struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah pendapat Sajuti Thalib karena manah dari keliuarga inti itu tidak lain adalah harta yang dibeli seseorang baik dari hasil mata pencahariannya maupun pemberian dari orang tuanya, hal itu bukanlah merupakan harta pusaka.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikemukakan ciri - ciri khusus dari harta pusaka tinggi, yaitu:

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya.
2. Oleh karena yang memilikinya adalah kaum secara bersama - sama untuk kepentingan bersama, oleh karenanya,
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya, kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama - sama pula.
4. Penguasaan harta pusaka tinggi ( hak ulayat kaum ) berada ditangan mamak kepala waris ( laki-laki tertua dalam kaumnya ), tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan keluar terhadap tanah

kaum, ia memerlukan persetujuan seluruh anggota kaumnya, terutama kaum perempuan dalam garis keatas. Karena anggota perempuan yang selalu menetap tinggal dalam suku kaumnya untuk tetap menjaga kelestarian tanah ulayat sukunya agar tidak jatuh kepada suku lain. Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki - laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Dalam hubungannya keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambing, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan.

### **2.3. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Dan Kaumnya**

Untuk memimpin unit organisasi masyarakat di Minangkabau kedudukan laki - laki sangat menonjol, sedangkan secara adat perempuan atau ibu mempunyai kedudukan tersendiri terutama terhadap penguasaan harta pusaka.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa unit organisasi masyarakat yang terkecil di Minangkabau adalah samande yang tinggal serumah dalam Rumah gadang,

kumpulan dari beberapa samande disebut saparuik ( seperut ) atau jurai kumpulan dari jurai disebut sekaum yang dipimpin mamak kepala waris / mamak kepala kaum ( saudara laki-laki dari ibu ).

Seseorang untuk dapat diangkat menjadi kepala kaum, suku, dan penghulu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Orang yang berhak ( anggota kaum / suku ).
2. Sepakat semua anggota kaum, suku baik dikampung maupun diperantauan.
3. Laki - laki tertua dalam kaumnya, suku baik umur maupun derajatnya dalam kaum, suku.
4. Mempunyai ilmu serta waras pikirannya.

Disamping syarat diatas juga dituntut mempunyai martabat yang mulia, adil, kaya, pemurah, sabar, beriman dan bijak bestari. Sedangkan untuk menjadi penghulu suku adalah seseorang yang berpredikat “ Datuk ” orang yang telah diangkat oleh anggota suku yang bersangkutan dan disahkan oleh nagari. Mamak kepala waris ini berfungsi mewakili harta badan hukum kedalam dan keluar, kedalam ia berwenang membimbing dan mengurus anak kemenakan yang disebut dengan wali perdamaian, memelihara dan mengembangkan harta pusaka kaum, mengatur peruntukan hasil dari pusaka itu untuk kesejahteraan anggota kaumnya. Untuk fungsi keluar mengurus hak ulayat kaum, hak ulayat suku, hak ulayat nagari, mewakili suku keluar menjadi dewan nagari dan dewan hakim nagari . Karena begitu besar tanggung jawab mamak kepala kaum / suku, sehingga ia diibaratkan :



- Sebuah pohon besar ditanah lapang.
- Uratnya untuk bersila.
- Batangnya tempat bersandar.
- Dahannya tempat bergantung.
- Daunnya untuk berteduh ketika hujan, serta berlindung ketika panas.
- Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita.
- Kusut menyelesaikan, keruh memperjernih.

Jika seorang kepala kaum / suku tidak dapat menjalankan tugasnya karena sesuatu hal ( sakit atau sudah tua renta ), maka ia dapat menunjuk salah seorang dari anggota kaumnya sebagai pengganti sementara sebagai wakilnya yang di sebut panungkek ( sebagai tongkat). Kedudukan dan fungsi sebagai kepala kaum / suku berdasarkan pilihan seluruh anggota kaum / suku, status ini tidak boleh diturunkan kepada anaknya atau kemenakannya sendiri (anak kakak / anak adik perempuannya ), yang boleh menurunkan kedudukan dan fungsi serta hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu adalah kemenakan yang terpilih dalam kaum / suku sebagai pengganti mamak kepala kaum / suku.

Disamping sebagai mamak kepala kaum / suku bagi seluruh kemenakannya, ia juga berstatus sebagai suami, atau sebagai seorang bapak dalam keluarga batih. Tugas selaku pembimbing kemenakan bagi seorang mamak dibekali dari pusaka tinggi / hak ulayat dalam kaum yang bersangkutan, sebagai bapak ia harus bertanggung jawab untuk memangku anak - anaknya, disamping membagi perhatian

terhadap seluruh kemenakannya dan orang sekampung. Dalam pepatah adat diungkapkan sebagai berikut:

- *Kaluak paku kacang balimbiang* ( keluk paku kacang belimbing ).
- *Tampuruang lenggang – lenggangkan* ( tempurung lenggang - lenggangkan ).
- *Di bawo ka saruaso* ( dibawah ke saruaso )
- *Anak dipangku kamanakan dibimbiang* ( anak dipangku kemenakan dibimbing ).
- *Urang kampuang dipatenggangkan* ( orang kampung dipertenggangkan ).
- *Jago nagari jan binaso* ( jaga negeri agar tidak binasa ).

Artinya, bila sianak berada dalam pangkuannya maka kemenakan harus ada dalam bimbingannya, dan orang sekampung harus diingatnya juga supaya adat nagari tidak binasa ( rusak ).

Sebagai tamu dalam suku ( clan ) istrinya, seorang semenda memang tidaklah diberi tanggung jawab secara kongkrit, namun sebagai seorang laki - laki yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat Minangkabau, orang semenda harus memiliki ketinggian budi, perasaan dan kearifan agar ia tidak menjadi beban dalam keluarga istrinya. Oleh karena itulah ia dibekali oleh kaumnya dengan dipinjamkan “ harato pambawo ”( harta bawaan ), biasanya berupa setumpak tanah / sawah yang diambil dari harta pusaka tinggi / ulayat kaumnya untuk tempat berladang / bersawah guna menunjang ekonomi keluarganya. Jika perkawinan putus, baik cerai hidup atau

cerai mati, maka harta tersebut dipulangkan kembali kepada kaum suaminya. Dan ia juga berhak, untuk menggarap harta pusaka tinggi kaum dari istrinya.

#### **2.4. Harta Pusaka Tinggi Dalam Perkembangan Pembangunan Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial**

Pesatnya pembangunan perumahan, pembelian tanah pusaka bagi perusahaan pengembang untuk kepentingan perusahaannya dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya telah di rasakan oleh masyarakat persekutuan adat Minangkabau , tidak terlepas tanah-tanah subur, lahan persawahan yang produktif menjadi incaran perusahaan pengembang ( developer ).

Untuk mempercepat lajunya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan yang memberikan kesempatan kepada pengusaha, kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, melalui peralihan biasa ataupun melalui pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No: 20 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 15 tahun 1975, serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No: 02 / KPTS / 1990 yang memberikan kesempatan / peluang pada perusahaan pengembang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya di bidang perumahan serta dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah memberikan kemudahan bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah melalui kredit pemilikan rumah.

Didalam Undang - Undang Pokok Agraria tahun 1960 dalam Pasal 5 : Menyatakan bahwa, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, ialah hukum adat. Dan dalam Pasal 17 adanya pengakuan sistim kepemilikan tanah secara bersama / komunal, namun pemberlakuan hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dapat saja dikalahkan. Dalam hal ini perubahan masyarakat hukum adat di pengaruhi oleh politik hukum pemerintah, tanpa dipengaruhi hukum pun masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara lambat artinya tidak ada satupun masyarakat yang statis ( berhenti ) pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya.

Selanjutnya Soeryono Sukanto mengklasifikasikan masyarakat, antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis di maksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan - perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat, masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan dengan cepat. Jika setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan - perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan ( progress ),

Namun dapat pula berarti suatu kemunduran dalam masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang - bidang kehidupan tertentu.<sup>19</sup>

Pada mulanya masyarakat berada dalam ruang lingkup kehidupan yang bercorak tradisional ( persekutuan adat ), namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan teknologi berubah menjadi masyarakat yang moderen, baik di pengaruhi oleh faktor - faktor internal maupun eksternal. Pada masyarakat moderen hukum berperan sebagai sarana rekayasa sosial ataupun mengendalikan masyarakat, dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan - perubahan dalam masyarakat yang mengarah pada tujuan - tujuan yang di kehendaki, menghapus kebiasaan yang di pandangnya tidak sesuai lagi, serta mencoba menciptakan pola - pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang di sebut pandangan moderen tentang hukum itu, yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.<sup>20</sup>

Pernyataan diatas berbeda sekali dengan pandangan atau konsep hukum yang diajarkan oleh aliran sejarah yang di kemukakan oleh Friedrich Harl Von Savigny , ia mengatakan, bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat ( voksgeist ). Konsep ini di dukung oleh kenyataan dalam sejarah, yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sifatnya, dimana peranan hukum kebiasaan lebih menonjol, dan tidak di jumpai peranan dari pembuat Undang - Undang seperti pada masyarakat sekarang ini. Menurut Von Savigny pada

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, "Pokok - pokok Sosiologi Hukum ", Rajawali Press, 1988, hal. 87

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat ", Angkasa , Bandung 1986, hal. 112

masyarakat ini hukum itu tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan perubahan - perubahan sosial, pendapat ini juga dianut oleh ahli hukum lainnya, seperti Summer dan Marx. Savigny memulai konsepnya tentang hukum yang tumbuh dibelakang norma informal ( mores ) atau kebiasaan. Hukum hanya memberikan pengesahan saja terhadap kebiasaan selaku norma informal yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat.<sup>21</sup>

Disini Savigny sepaham dengan Summer yang mengemukakan bahwa norma – norma informal ( mores ) senantiasa mendahului norma – norma hukum, sedangkan norma – norma informal itu sendiri tak dapat dirubah oleh hukum. Perubahan terhadap norma – norma informal itu hanya mungkin melalui suatu proses yang perlahan – lahan dan dalam jangka waktu yang lama, apabila secara substansial perubahan itu dikerjakan sendiri oleh kekuatan dalam masyarakat.

Teori Klasik dari Marx juga tidak dapat menerima penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, karena menurutnya hukum itu merupakan struktur atas ekonomi dan teknologi. Ekonomi dan teknologilah yang lebih dulu berkembang dan hukum ketinggalan oleh perubahan – perubahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan – perkembangan ekonomi dan teknologi, sekalipun ia juga mengakui hukum dapat dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kebijaksanaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, " Ilmu Hukum ", Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal. 206

<sup>22</sup> Franz Magnis – Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia Jakarta 1995, hal. 77

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola – pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan – tujuan yang dikehendaki, mengharuskan kebiasaan – kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola – pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.

Proses menciptakan pola – pola kelakuan baru dengan menghapus kebiasaan – kebiasaan yang dipandang yang tidak sesuai, merupakan institusionalisasi di bidang hukum untuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi menyebutkan bahwa proses perkembangan lembaga – lembaga dinamakan *institusionalisasi* ( pelebagaan ) dan proses ini terjadi bilamana sesuatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai – nilai dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sehingga diminta agar anggota masyarakat tersebut mematuhi. Proses demikian terjadi dimana – mana dan terumuskan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Cohen (1983 ) menyatakan bahwa institusionalisasi adalah perkembangan sistem yang teratur dari norma – norma, peranan – peranan yang ditetapkan dan diterima masyarakat. Laomis ( 1960 ) menyatakan bahwa proses institusionalisasi

---

<sup>23</sup> Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, Bina Aksara Jakarta 1988, Hal. 62

menyangkut semua unsur dan proses sosial yang ada, maka selanjutnya untuk normalah dianggap lebih penting ( utama ). Soejono Soekanto ( 1983 ) menyatakan bahwa *institusionalisasi* ( pelebagaan ) adalah proses dimana unsur norma menjadi bagian dari suatu lembaga.

Proses pelebagaan ini dapat terjadi dengan membongkar semua nilai – nilai yang dianggap kuno, dan membentuk kelembagaan baru dengan isi yang sama sekali baru, namun dapat pula terjadi dengan tetap memakai bingkai lama dengan substansi yang memuat nilai – nilai baru.

Pelebagaan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial, bisa saja berawal dari peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan agar supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar ( evolusioner ). Dalam praktek setiap cara dan tindakan mempunyai resiko masing – masing. Perubahan dan pembaruan masyarakat yang dibiarkan secara alami mungkin mengakibatkan perkembangan masyarakat ke arah yang tidak diinginkan atau bahkan mengakibatkan kemunduran ( Anarki ).<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dari tatanan kehidupan masyarakat Minang yang sebelumnya kental dengan solidaritas yang kuat terutama dalam kaumnya sekarang mulai memudar kearah Individu dan telah berkurangnya fungsi mamak dalam kaumnya maupun harta – harta pusaka.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, “ Ilmu Hukum .”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 207



masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan – kepentingan dari pihak yang mengadakan hubungan tersebut.

Sekalipun Durkeim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *Social Engineering* atau lengkapnya *Social Engineering by Law*. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari indentifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya yaitu :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik – baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai -- nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai – nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa – hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek – efeknya.

Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk melakukan perubahan – perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses - proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum – hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut dimuka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan – pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan – tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Disini kembali kita diingatkan kepada tahap – tahap *social engineering* tersebut dimuka.<sup>26</sup>

Weber, seorang ahli sosiologi modern membicarakan tentang perkembangan hukum sehingga sampai kepada bentuknya yang sekarang ini, dominasi itu bertolak dari struktur yang kharismatik dan tradisional menuju ke struktur yang legal rational.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 207 - 211

Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat Barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya.

Didalam meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, Weber sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu negara dengan hukumnya. Cara – cara penyelenggaraan hukum dan peradilan masa lalu menurut Weber bersumber pada cara – cara perukunan ( conciliatory ) antara kelompok – kelompok suku yang bersengketa. Tetapi bila kekuasaan politik disitu didalam menjalankan roda pemerintahan makin bersifat rasional, maka akan makin besar pula kemungkinannya proses hukum didalam masyarakat itu dijalankan secara rasional pula. Sesuai dengan makin meningkatnya sifat rasional pengorganisasian, maka bentuk – bentuk irasional yang dipakai semakin ditinggalkan, sedangkan hukum material akan mengalami sistimatisasi, yang berarti bahwa keseluruhan bidang hukum mengalami rasionalisasi.<sup>27</sup>

Ada satu hal yang menarik dari pandangan Weber, sekalipun mengakui bahwa teori rasionalitasnya dapat dipengaruhi faktor – faktor eksternal, seperti agama, namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi.

Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifat negatif, artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum bisa dijelaskan sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, Op cit , hal. 105

<sup>28</sup> Ibid, hal. 295

Ok. Chairuddin seperti dikutip dari Ritzer mengatakan : paradigma definisi sosial, adalah merupakan salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial ( social action ). Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti ( bermakna ). Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusia itu sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi – segi prinsipil dari kehidupan sosial.<sup>29</sup>

Teori interaksionisme simbolik mencoba untuk lebih mempertajam teori aksi yang dikemukakan Weber, dengan menyatakan bahwa interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol – simbol dan melalui kulturnya, masyarakat menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol – simbol tersebut simbol – simbol mana ikut memberikan pembatasan terhadap tindakan individu.

Sedikit berbeda dengan paradigma definisi sosial, teori fungsionalisme struktur dalam paradigma fakta sosial justru memusatkan perhatiannya kepada struktur sosial dan pranata sosial. Hampir semua penganut teori ini seperti Robert K Merton punya asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain dengan saling menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Merton juga mengingatkan agar jangan terjadi pencampuradukan antara motif – motif subyektif dengan pengertian fungsi. Perhatian fungsionalisme struktural harus

---

<sup>29</sup> Ok. Chairuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44

lebih banyak ditujukan kepada fungsi – fungsi dibandingkan dengan motif – motif. Fungsi menurutnya adalah akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi dalam suatu sistem, namun karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka dapat pula menimbulkan disfungsi. Beliau memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Artinya struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta – fakta sosial lainnya, sebaliknya ia dapat pula menimbulkan akibat – akibat yang negatif. Institusi sosial tertentu dapat fungsional bagi suatu unit tertentu dan sebaliknya disfungsional bagi unit sosial yang lain.<sup>30</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa untuk meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu didalam kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini suatu teori yang dikembangkan Talcott Parsons menjelaskan ; kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitik tolak dari tindakan individu. Bahkan dapat juga dikatakan, bahwa teori Parsons merupakan penggambaran yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitannya yang luas.

Pada teori Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan ( sosial ) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur. Tindakan

---

<sup>30</sup> George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26

seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem yang besar dan yang terbagi atau terurai kedalam sub sistem sosial yang mempunyai fungsi primer untuk tujuan integrasi, sub sistem budaya yang berfungsi primer untuk mempertahankan pola sub sistem kepribadian dengan fungsi primernya untuk mencapai tujuan, serta sub sistem organisme kelakuan dengan fungsi primer untuk beradaptasi. Diantara sub sistem – sub sistem itu terdapat fenomena saling merasuki satu sama lain, sehingga menimbulkan wilayah – wilayah saling perasukan.

Dengan demikian perhatian Parsons tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk dan keluaran dengan lingkungannya.<sup>31</sup>

Dalam skemanya Parsons menyusun unit – unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan – tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut adalah

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung , 1983, hal. 25 – 30

merupakan situasi dan kondisi yang sekaligus sebagai alat yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya jenis kelamin dan tradisi.

5. Aktor berada dibawah kendala dan nilai – nilai, norma – norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Misalnya kendala kebudayaan.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan perihal hukum perubahan sosial ini, terutama dalam peranannya sebagai sarana untuk melakukan : “ Social Engineering ”, oleh Satjipto Rahardjo, UUPA yang merupakan peraturan dasar dibidang pertanahan dimasukkan kedalam kategori penggunaan hukum sebagai sarana SE ( *social engineering* ), oleh karena ia tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan – perubahan yang lain, terutama perubahan proses sosial, namun sebagai sarana Social Engineering, UUPA tak luput dari kekurangan – kekurangan yang menyertainya, antara lain :

1. Perombakan struktur pemilikan tanah yang semestinya merupakan bagian dari suatu usaha perubahan yang lebih besar, kurang dilakukan dengan sistematis dan berencana.
2. Suasana yang meliputi pembuatan UUPA terutama nampak dikuasai oleh romantisme, seperti sikap terhadap penjajah serta citra dan penghargaan yang diletakkan pada hukum adat. Pemikiran serta siasat ekonomi kurang

---

<sup>32</sup> Ok Chiruddin, Ibid, hal. 45

sekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang dimasuki oleh UUPA ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kegiatan ekonomi.

Masalah pertama yang dihadapi UUPA sebagai sarana untuk melakukan Social Engineering adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai suatu peraturan dasar di bidang agraria. Dalam kedudukannya yang demikian itu ia barang tentu hanya dapat diharapkan untuk sampai pada pengadaan tentang azas - azas dan pemberian penghargaan yang umum sifatnya. Oleh karena itu keberhasilannya sebagai sarana Social Engineering untuk bagian terbesar akan tergantung pada peraturan - peraturan yang menjabarkannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op cit, hal. 181, 182



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *sosiolegal research* dan sifat penelitian adalah *deksriptif*. Dalam menggambarkan obyek penelitian lebih mementingkan sudut pandang subjek.

#### **3.2. Penentuan Sampel**

Tehnik sampling yang digunakan dalam bentuk *purposif*. Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan “ *snowball sampling* ” ( sampling bola salju ). Jumlahnya belum dapat dipastikan sejak semula karena tergantung pada pengembangan data dilapangan sampai dirasa tuntas.

#### **3.3. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah data dekskriptif terutama dalam bentuk data primer dengan tidak mengenyampingkan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari dari sumber informasi / narasumber yakni dari anggota kaum Suku Guci, Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara, Pemerintah Kota Padang dan Ketua IV LKAAM. Di lokasi penelitian yang menurut rencana dilakukan di Kecamatan Padang Utara, sedangkan sumber data sekunder yaitu peraturan,

dokumen – dokumen, makalah, tambo - tambo dan sejenisnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### **3.4. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Pada awal penelitian wawancara dilakukan tidak berstruktur, namun bila dirasa cukup wawancara selanjutnya akan dilakukan dengan berstruktur. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen.

#### **3.4.1. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 3.4.1.1. Peneliti sendiri sebagai instrumen kunci.
- 3.4.1.2. Buku catatan
- 3.4.1.3. Alat perekam ( jika dimungkinkan dan diperkirakan tidak mengundang kekhawatiran responden ).

### **3.5. Teknik Analisis Data Bersifat Kualitatif**

Semua data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara analisis taksonomis, analisis komponensial serta analisis tema cultural.

- 3.5.1. Analisis domain, dilakukan untuk memperoleh gambaran / pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang terdapat dalam

pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya masih merupakan pengetahuan / pengertian ditingkat permukaan tentang domain, ruang / tempat, domain rasional / alasan lain-lain.

- 3.5.2. Analisis Taksonomis, dilakukan guna mengetahui domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena / fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Dalam analisis ini dilakukan secara rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing - masing domain dengan cara mengorganisasikan atau menghimpun elemen yang berkesamaan disuatu domain.
- 3.5.3. Analisis Komponensial, dilakukan guna mengetahui perbedaan kontras antar elemen dalam suatu domain, jadi disini tidak lagi menunjukkan struktur internal masing – masing domain dengan menghimpun elemen – elemen yang memiliki kesamaan disuatu domain, seperti domain taksonasis diatas .
- 3.5.4. Analisis tema cultural, dilakukan guna mencari “ Benang Merah ” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada dengan gagasan yang bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar jumlah bagian, situasi sosial dan budaya apapun yang teliti, dalam kenyataanya bukanlah sekedar jumlah dari pecahan – pecahan aktifitas pelaku, tempat dan fasilitas yang ada dalam situasi tersebut, melainkan suatu kesatuan yang terpola dalam suatu

keseluruhan ( complex pattern ) sehingga terdapat tema – tema yang dijadikan orientasi kognitif oleh para pelakunya.<sup>34</sup>

### 3.6. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data, yakni data atau informasi dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>35</sup>

Patton, membedakan empat macam triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Hal ini ditempuh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

<sup>34</sup> Sanapiah Fasal, Penelitian Kualitatif, Yayasan Asah Asih Asuh, hal. 91 - 107

<sup>35</sup> Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung ,Remaja Rosdakarya, hal. 178

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian.**

##### **4.1.1. Monografi wilayah penelitian ( Kotamadya Padang )**

Kota Padang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu : pada posisi  $00^{\circ} 44'00'' - 01^{\circ} 08'35''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 05'05'' - 100^{\circ} 34'09''$  Bujur Timur. Luas daerah Seluruhnya  $644.96 \text{ km}^2$  namun yang dapat dimanfaatkan hanya seluas  $205.007 \text{ km}^2$  dan selebihnya merupakan daerah perbukitan ( termasuk daerah aliran sungai ).

Kota Padang berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu : Kabupaten Padang Pariaman di sebelah Utara, Kabupaten Pesisir Selatan di Sebelah Selatan dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, sedangkan di Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran rendah, perbukitan dan wilayah Sungai. Disini juga terdapat 21 buah Sungai dan 17 buah pulau, yang berlokasi pada beberapa wilayah Kecamatan.

Dengan kondisi demikian, curah hujan cukup tinggi di Kota Padang.

Wilayah Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1996 – 2000 berjumlah 777.044 jiwa .

Kepadatan penduduk yang tinggi berada di Kecamatan Padang Timur, sedangkan yang paling jarang penduduknya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Setiap tahunnya pertambahan penduduk berkisar 10 % - 20 % tiap tahun.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pemerintah kota berusaha agar penyebaran penduduk di Kota Padang merata sehingga tidak terpusat di pusat perkotaan dan perdagangan. Melalui program – program pemerintah dengan cara membangun daerah atau kecamatan yang masih jarang penduduknya.

Dalam rangka menjalankan Programnya, pemerintah kota membuat Rancangan Penataan Ruang Kota yang di dalam Rencana Induk Kota yang telah ditetapkan sekali 20 th, namun dalam perkembangan fisik kota tidak sepenuhnya mengikuti pola Rencana Induk Kota, sewaktu - waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota.

Selanjutnya luas lahan serta penggunaan lahan di kota Padang secara terinci dapat dilihat dalam tabel yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota tahun 1984 s/d 2004. Tabel I.

**TABEL 1**  
**PENGUNAAN LAHAN PERTANIAN DAN LAHAN KOSONG**  
**DI KOTAMADYA PADANG, 1990 (DALAM HA)**

No	Kecamatan	Sawah	Kebun campuran	Tegalan/ Ladang	Semak / Alang-alang	Rawa - rawa	Jumlah
		0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
01	Padang Barat	219,0	10,0	0,0	13,0	0,0	242,0
02	Padang Timur	79,0	28,0	2,0	55,0	94,0	258,0
03	Padang Utara	60,0	543,0	3,0	17,0	2,0	625,0
04	Pzdang Selatan	2.046,0	5.373,0	170,0	765,0	82,0	8.436,0
05	Koto Tengah	347,0	189,0	57,0	0,0	0,0	593,0
06	Nanggalo	1.907,0	1.334,0	72,0	35,0	0,0	3.348,0
07	Kuranji	1.206,0	3.095,0	17,0	320,0	0,0	4.638,0
08	P a u h	622,0	909,0	4,0	437,0	0,0	1.972,0
09	Lubuk Kilangan	758,0	458,0	28,0	74,0	0,0	1.328,0
10	Lubuk Begalung	1.037,0	1539,0	13,0	59,0	34,0	2.692,0
11	Bungus Tlk. Kabung						
Kotamadya Padang		9.291,0	13.478,0	366,0	1.785,0	225,0	24.145,0
Ratio (%)		34,3	55,8	1,5	7,4	0,9	100,0

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional TK II Padang

Menurut pemerintah kota Padang pada masa yang akan datang perumahan akan tetap merupakan faktor yang dominan serta sangat menentukan perkembangan fisik kota, Bahkan dapat juga diartikan sebagai penyebab utama pertumbuhan fisik kota. Sehubungan dengan itu tanpa campur tangan yang kuat dari pemerintah kota,

diperkirakan lima ( 5 ) atau sepuluh ( 10 ) tahun yang akan datang kawasan

perumahan akan berkembang dalam tiga corak utama yaitu :

1. Densifikasi
2. Spontan
3. Terencana

Berikut ini tabel penggunaan lahan daerah yang telah terbangun menurut jenis per- Kecamatan di Kotamadya Padang, 1990 ( dalam Ha ).

**Tabel 2**  
**PENGUNAAN LAHAN DAERAH TERBANGUN MENURUT JENIS**  
**PERKECAMATAN**  
**DI KOTA MADYA PADANG, 1990 ( DALAM HA )**

No	Kecamatan	Perumahan	Transportasi	Pendidikan	Perdagangan	Perkantoran	Industri	Rekreasi	Kesehatan	Jumlah
01	Padang Barat	345,0	62,0	16,0	64,0	30,0	1,0	5,0	1,0	524,0
02	Padang Timur	426,0	106,0	15,0	12,0	22,0	14,0	-	10,0	605,0
03	Padang Utara	353,0	90,0	30,0	9,0	22,0	5,0	5,0	1,0	515,0
04	Pzdang Selatan	454,0	81,0	7,0	31,0	8,0	5,0	3,0	1,0	590,0
05	Koto Tengah	740,0	131,0	20,0	38,0	10,0	12,0	10,0	1,0	962,0
06	Nanggalo	240,0	49,0	8,0	4,0	13,0	-	-	1,0	315,0
07	Kuranji	360,0	67,0	12,0	-	12,0	3,0	1,0	1,0	456,0
08	P a u h	240,0	48,0	155,0	2,0	15,0	14,0	1,0	1,0	476,0
09	Lubuk Kilangan	280,0	54,0	10,0	8,0	30,0	45,0	30,0	1,0	458,0
10	Lubuk Begalung	400,0	72,0	10,0	34,0	17,0	49,0	1,0	1,0	584,0
11	Bungus Tik. Kabung	171,0	40,0	4,0	3,0	4,0	11,0	5,0	1,0	239,0
Kotamadya Padang Ratio ( % )		4.009,0 70,0	800,0 14,0	287,0 5,0	205,0 3,6	183,0 3,2	159,0 2,8	61,0 1,5	20,0 0,3	5.724,0 100,0

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional TK II Padang

Dalam rangka pemerataan pertumbuhan penduduk pemerintah kota berusaha memindahkan penduduk dari kawasan pemukiman yang padat dan dibawah standart



pada beberapa tempat didalam kota Padang terutama di pusat kota, ke tempat yang lebih layak, baik bagi masyarakat berpenghasilan tinggi maupun bagi masyarakat penghuni kawasan kumuh yang berpenghasilan rendah. Pemerintah kota memberikan standart pengadaan perumahan di kota Padang, berikut tabel standart

Tabel 3

## STÁNDAR PENGADAAN PERUMAHAN DI KOTA PADANG

Kelas	Kawasan / KDB (Koefisien Dasar Bangunan)	Orientasi Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Penghuni rata-rata (Jiwa)	Pertimbangan Perencanaan
1	Perumahan Mewah (Wisma Besar) KDB Maks = 40 %	Lubuk Minturun, Perupuk Tebing, Bungus, Seberang Palinggan, Kel. Padang Pasir, Kel. Padang Baru, Belanti, Ulak Karang, Air Tawar, Lubuk Begalung, Kuranji, Dadok Tunggul Hitam, Air Pacah.	501- 1.000	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan sepenuhnya fasilitas alam, seperti kondisi topografi, daya tarik pemandangan alam, dan iklim mikro setempat</li> <li>- Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan yang tinggi bagi pemiliknya</li> <li>- Perlu dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan pertokoan bergengsi.</li> <li>- Disesuaikan dengan kondisi saat ini</li> </ul>
2	Perumahan Sedang (Wisma Sedang) KDB Maks = 50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekitar Pasir Jambak</li> <li>- Sekitar Tabing</li> <li>- Lubuk Minturun</li> <li>- Air Pecah</li> <li>- Duku dan sekitarnya</li> <li>- Air Tawar / Tabing</li> <li>- Kelurahan Jati</li> </ul>	301 – 500	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan lingkungan yang memadai penghuni, terletak diantara hunian mewah dan sederhana, memanfaatkan fasilitas alam yang tersedia seperti topografi, sungai, laut dll.</li> <li>- Disesuaikan dengan kondisi saat ini.</li> </ul>
3	Wisma Sederhana (Wisma Sedang II) KDB Maks = 50 %	Lubuk Buaya, Tebing, Perupuk Air Tawar, Belanti, Nanggalo, Pauh, Lubuk Begalung, dan Pusat Kota.	201- 300	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pencapaian yang baik terhadap sarana transportasi massa.</li> <li>- Dekat dengan kegiatan perdagangan, industri dan tempat bekerja lainnya.</li> </ul>
4	Wisma Kecil Kepadatan : Tinggi, KDB Maks 70 % Sedang, KDB Maks 65 % Rendah, KDB Maks 60 %	Lubuk Buaya, Anak Air, Kuranji, Balai Baru, Siteba, Rawang Barat, Rawang Timur, Pengambiran, Andalas.	< 201	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pencapaian yang baik terhadap sarana transportasi massa.</li> <li>- Dekat dengan kegiatan perdagangan, industri, serta tempat bekerja lainnya.</li> <li>- Tanah relatif datar dan murah sehingga lebih mungkin berharga murah.</li> </ul>
5	Wisma Desa / Petani (Wisma Taman) KDB Maks 20 %	Anak Air, Air Dingin, Bungus Teluk Kabung, Sungai Pisang.	2.500- 5.000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertimbangkan bentuk fisik pemukiman petani dewasa ini.</li> <li>- Memperhatikan pola kekerabatan penduduk petani yang ada saat ini.</li> </ul>

Sumber : Kantor Tata Ruang Kota TK II Padang

Dalam rangka menjalankan program pemerintah kota untuk memajukan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan penduduk diperlukan campur tangan Badan Usaha Swasta baik itu bergerak di bidang Industri, Perdagangan, Pembangunan Perumahan ( *Developer* ).

Berikut tabel perubahan penggunaan tanah dari tahun 1994 sampai dengan 2001 yang telah dibangun oleh perusahaan Properti ( *Developer* ) yang aktif di kota Padang. Tabel dapat dilihat pada lampiran I.

#### **4.1.2. Penjualan Tanah Pusaka Tinggi dan alasan Mamak Kepala Waris /**

##### **Mamak Kepala Kaum dan anggota kaum.**

Pada umumnya masyarakat Asli, khususnya di kecamatan Padang Utara dahulunya, sumber penghidupan mereka dari hasil sawah dan ladang yang mereka olah sendiri apabila setelah panen mereka menunggu panen berikutnya mereka mencari pekerjaan lain yaitu berdagang. Sesuai dengan kondisi tanah yang berawa dan sawah yang luas, sehingga lahan yang ada disekitar mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Seperti tersedianya lahan untuk tambak ikan, hasil panen sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka merasa hidup berkecukupan dan pendidikan bukanlah merupakan kebutuhan yang utama. Dengan adanya tanah pusaka yang menjamin kesejahteraan hidup mereka sehingga mereka menomorkan pendidikan.

Sekarang jaman telah berubah, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempengaruhi semua segi kehidupan manusia, baik dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya manusia yang mana semua itu tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat Kota Padang khususnya Kecamatan Padang Utara. Tanpa disadari mereka secara langsung / tidak langsung mereka juga telah dipengaruhi perkembangan pembangunan, hal ini terbukti dengan banyaknya tanah pusaka mereka telah beralih atau dijual untuk pembangunan perumahan.

Menurut informasi “ Ramli “ selaku Lurah Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, bahwa separuh atau 50 % dari jumlah tanah pusaka tinggi yang ada didaerahnya telah beralih atau telah dijual pada perusahaan *Developer* dan dijual perkapling pada perorangan. Peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi tersebut banyak terjadi awal tahun 1990-an, dimana saat itu para *Developer* banyak melirik Kecamatan Padang Utara karena letaknya strategis yaitu di kawasan perkantoran dan tengah kota yang dibelah dua oleh jalan utama yaitu jalan Khatib Sulaiman. Tanah pusaka yang telah beralih di kelurahan Gunung Pangilun dapat dilihat dari monografi kelurahan pada lampiran II.

Banyaknya tanah harta pusaka tinggi yang beralih pada *developer* untuk pembangunan properti, menjadi kompleks perumahan. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebagai kasus akibat dari penjualan di kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara yaitu pemilik asal tanah dari kompleks perumahan Belanti Permai II di Berok Gunung Pangilun. Alasan peneliti memilih karena penelitian ini sangat sensitif, sebab menyangkut masalah keluarga (masalah pribadi Anggota

Kaum) yang akan menimbulkan kecurigaan, ketidaksenangan anggota Kaum / Mamak Jurai karena menyangkut aib keluarganya sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan kepada Anggota Kaum, dan peneliti sendiri pernah menjadi warga Berok Gunung Pangilun dan peneliti telah mengenal dan pernah bergaul dengan anggota Kaum tersebut serta peneliti mendengar keluhan dari anggota Kaum akibat penjualan tanah pusaka oleh Mamak Kepala Waris. Pada saat peneliti turun ke lokasi agar mendapat informasi yang benar dan data yang akurat peneliti melakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan sangat hati – hati agar tidak menyinggung perasaan dan harga diri Anggota Kaum.

Dimana tanah tersebut dalam penjualan atau peralihan pada *Developer* menimbulkan permasalahan dan terjadinya gugatan dari salah satu Jurai di Pengadilan Negeri Padang tahun 1995. Yang mana permasalahannya dalam perkara perdata nomor : 35 / PDT. G / 1995. PN. PDT. Dimana salah satu Jurai tidak diikutsertakan dalam penjualan Tanah Pusaka Tinggi tersebut sedangkan dalam Jurai yang menjual itu, tidak semuanya anggota Kaum itu setuju untuk menjual Tanah Pusaka Tinggi tersebut, sehingga dalam peralihannya dilakukan dengan cara tidak benar dengan cara penipuan dan memalsukan tanda tangan anggota Kaumnya oleh Jurai yang menjual tanah tersebut.

Hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan pada anggota Jurai / Kaum suku Guci di Berok Gunung Pangilun, menurut anggota Jurai / Kaum Suku Guci, bahwa dalam penjualan tanah pusaka tinggi itu oleh Mamak Kepala Waris yaitu Syamsudin Syafei ( almarhum ) pada tahun 1982 telah melakukan perikatan

jual – beli tanah itu pada H. Amir Jalil untuk pembangunan hotel tanpa sepengetahuan anggota Kaum. Sebenarnya dia bukanlah Mamak Kepala Waris yang sebenarnya, ia hanya Mamak Paruik sedangkan Mamak kepala Waris yang sebenarnya adalah Gonjong, kemudian Syamsudin meminta dirinya untuk ditunjuk menjadi Mamak Kepala Waris, oleh Gonjong dengan meminta persetujuan anggota Kaum dengan alasan ia orang berpendidikan, pintar, orang berduit dengan harapan dapat melindungi anak kemenakannya dalam kaum suku Guci. Kemudian ia diangkat menjadi Datuk dengan upacara adat dengan memotong sapi, kemudian daging sapi dibagi – bagikan pada anggota kaum, dan setiap hari raya Idul Fitri Mamak Kepala Kaum / Mamak Kepala Waris ( Syamsudin Syafei ) memotong sapi untuk anak kemenakannya. Ternyata daging sapi yang diterima anggota kaum setiap tahunnya dicatat sebagai hutang anak kemenakannya, sehingga lama kelamaan jumlah bertambah banyak.

Sebelumnya, pada tahun 1978 keluar program pemerintah daerah melalui instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional dimana kesempatan itu digunakan untuk mensertifikatkan tanah pusaka tingginya. Pada saat itu Mamak Kepala Waris menyarankan pada anak kemenakannya dan Mamak Paruik, Mamak Jurai di Kandih Nanggalo agar tanah itu disertifikatkan untuk menguatkan bukti pemilikan tanah kita. Dengan alasan tersebut semua anggota Kaum, menyetujui untuk mensertifikatkan tanah kaumnya. Dalam memenuhi syarat - syarat formalitas harus dengan persetujuan anggota Kaum dan ditunjuk Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Kaum mewakili badan hukum tanah Kaum tersebut, kemudian Mamak Kepala Kaum

meminta tanda tangan Anak Kemenakannya dengan cara menandatangani kertas kosong rangkap dua, dengan dalih memberi kuasa mensertifikatkan tanah, dalam penandatanganan itu diikutsertakan anggota Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo. Pada saat penandatanganan kertas kosong hanya dilakukan oleh Mamak Paruik dan anggota Paruik yang perempuan ( kakak atau adik perempuannya ). Setelah sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional atas nama Syamsudin Syafei sebagai Mamak Kepala Kaum, ternyata kertas kosong yang ditandatangani tadi isinya adalah :

- Satu rangkap untuk memberi persetujuan mensertifikatkan tanah
- Dan satu rangkap lagi surat kuasa untuk menjual tanah.

Sehingga ia dapat melakukan perikatan jual - beli dengan H. Amir Jalil. Dengan kertas kosong yang ditanda tangani anggota Kaumnya, kemudian oleh Mamak Kepala Kaum dikemukakan lagi idenya untuk menjual tanah tersebut, dalam hal ini tidak mendapat respon dan tanggapan dari anggota kaum, sehingga para Kemenakan tersebut membuat surat kepada Walikota Padang dan Instansi Agraria, serta seluruh notaris di kota Padang, meminta agar perikatan jual – beli yang telah dilakukan oleh Syamsudin Syafei ( Mamak Kepala Waris ) dengan H. Amir Jalil dibatalkan, kemudian H. Amir Jalil menggugat Kaum Syamsudin Syafei (Mamak Kepala Waris) dan dimenangkan oleh H. Amir Jalil, tetapi tanah tidak dapat dikuasai oleh H. Amir Jalil karena pihak yang berperkara adalah masyarakat adat Minangkabau maka harus ada persetujuan anggota Kaum, kemudian Mamak Kepala Kaum tersebut meninggal dunia. Karena tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Amir Jalil. Kemudian tahun 1993 datang PT Rahaka Cipta membeli tanah untuk

perumahan dengan menawarkan harga yang lebih tinggi, sehingga sisa uang yang diterima Mamak Kepala Paruik lebih besar sejumlah Rp. 92.000.000,00, jika dibandingkan dengan sisa penjualan dengan H Amir Jalil, antara Mamak Kepala Waris dengan H. Amir Jalil mengadakan perdamaian, dalam hal ini Mamak Kepala Waris pengganti ( Gonjong ) melakukan perundingan dengan Mamak Paruik dan anggota kaum untuk menjual tanah Pusaka tersebut. Entah bagaimana caranya terjadi kesepakatan antara Mamak Paruik dengan Mamak Kepala Waris, namun tidak semua anggota kaum mengetahui tentang kesepakatan untuk menjual tanah pusaka tinggi mereka. Dalam perundingan tersebut Bundo Kandung tidak diikutsertakan. Untuk mendapatkan persetujuan anggota kaum yang di Berok Gunung Pangilun ada dua cara yaitu :

- Bagi yang setuju untuk menjual

Secara sukarela anggota Kaum menandatangani surat kuasa jual – beli.

Alasan harta pusaka tinggi dijual menurut Mamak Kepala Waris Gonjong :

- a) Untuk membayar hutang Syamsudin Syafei sebagai Mamak Kepala Kaum / Kepala waris.
- b) Sisa hasilnya untuk dibagi – bagikan pada anggota Kaum, kemudian terserah anggota Kaum apakah untuk dijadikan modal usaha atau untuk dibelikan kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya.
- c) Agar tidak terjadi pertengkaran anatara sesama anggota Kaum dikemudian hari.



- Bagi yang tidak setuju

Alasan anggota kaum tidak menyetujui penjualan tanah Pusaka Tinggi adalah karena hutang yang dibuat H. Syamsudin Syafei adalah hutang pribadinya sendiri dan bukan hutang untuk keperluan anggota kaum, menurut ketentuan Adat yang 4 perkara. Sedangkan ia dalam menjalankan usahanya hasil dari usaha tersebut adalah untuk Anak dan Istrinya dan membuat rumah bagus serta memiliki mobil untuk Anak Istrinya sedangkan Anak Kemenakannya hidup miskin, maka tanah pusaka tersebut untuk menunjang perekonomian anggota Kaumnya.

Sebelum dijual tanah Harta Pusaka Tinggi tersebut diperuntukkan sawah dan tanaman rumbia. Luas tanah sebelum dijual 2,4 hektar dan yang dijual hanya 2 hektar sedangkan 0,4 hektar yang telah ditempati untuk rumah Adik / Kakak perempuan dan kemenakan Mamak Paruik yang telah berkeluarga ( rumah kecil ). Menurut anggota kaum terutama yang perempuan Harta Pusaka Tinggi itu masih perlu dipertahankan karena untuk menunjang perekonomian anggota Kaum. Dalam pembagian menikmati Harta Pusaka Tinggi bagi anggota Kaum dengan cara bergilir per tahun ( sawah ), jika ada anggota Kaum yang akan mengawinkan anak gadisnya setahun sebelumnya ia sudah memberitahukan kepada anggota kaum yang sedang mengelola sawah tersebut bagi yang akan mendapat giliran berikutnya mengalah, dan memberikan hak tersebut kepada anggota Kaum. Pembagian rumbia bagi anggota Kaum yang rumahnya masih beratap rumbia maka ia bebas mengambil daun tersebut untuk mengganti atap rumahnya yang telah bocor dan batangnya boleh dijual oleh anak kemenakannya yang membutuhkan biaya sekolah atau uang jajan.

Setelah harta pusaka tinggi dijual, sawah dan ladang rumbia telah menjadi komplek perumahan timbul perasaan menyesal ( mener ) keluar ucapannya kepada kemenakannya ( dar ) ternyata tanah kita luas juga, kalau diolah dengan baik pasti mendatangkan hasil yang lebih banyak. Setelah harta pusaka tinggi dijual, hubungan Mamak Kepala Waris dan Mamak Paruik terjadi perubahan dan tidak terjalin lagi hubungan ikatan batin yang kuat dulu menjadi putus, sehingga kalau Mamak Paruik datang ke rumah Kakak / Adik perempuan atau kemenakan seolah – olah seorang musuh atau orang asing yang datang berkunjung, anak kemenakan pergi menghindar.

Uang sisa hasil penjualan harta pusaka tinggi tersebut hanya untuk kenikmatan sesaat dan tidak ada bekasnya bagi anggota Paruik dan bagi mamak kepala waris uang hasil penjualan itu dibawa pulang ke rumah istrinya dan dibelikan pada tanah atau kebutuhan yang lainnya. Sisa dari pelunasan hutang Mamak Kepala Waris yang meninggal ( Syamsudin Syafei ) dibagi sama rata yang jumlah pembagian menurut Paruik, masing – masing mendapat Rp. 2.500.000,00

Menurut pengakuan anggota kaum yang di Berok Gunung Pangilun, bahwa Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo memang anggota kaumnya, mereka sepusaka, sepadan perkebunan, segelok segadai, sehina semalu. Menurut pengakuan anggota kaum Jurai yang dikandih telah mendapat tanah ganggam bauntuak di Kandih Olo Nanggalo tetapi apabila ia memanen padi atau menjual hasil ladang dari pusaka di Kandih Olo Nanggalo, anggota Jurai yang di Berok Gunung Pangilun masih menerima hasil panen yang diberi oleh Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo. Menurut Jurai yan di Kandih Olo Nanggalo, ia hanya menandatangani kertas kosong tetapi ia

tidak tahu kegunaannya untuk menjual tanah pusaka itu. Memang telah dilakukan pemisahan Ranji / Silsilah keturunan menurut Jurai masing – masing tetapi Ranji Induk masih satu dan di simpan oleh Syamsudin Syafei ( almarhum ) sebagai Mamak Kepala Waris.

Setelah PT Rahaka Cipta memulai pembangunan dan meratakan sawah dengan tanah, baru Jurai yang dikandih mengetahui bahwa tanah pusaka tinggi milik kaumnya telah dijual, kemudian ia menggugat pihak - pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual – beli tanah tersebut, karena ia merasa berhak atas tanah kaumnya itu.

Dalam sengketa perdata Nomor : 35 / PDT.6 / 1995. PN PDT di Pengadilan Negeri Padang, dimana gugatan penggugat ( Jurai yang di Kandih Olo Nanggalo ) ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan Hukumnya sebagai berikut :

Bahwa penggugat tidak sekaum hanya sesuku yaitu Suku Guci, sehingga penggugat dianggap orang yang tidak berhak atas tanah pusaka tersebut.  
( dapat dilihat dalam Lampiran III dan IV )

#### **4.2. Pola / Prosedur Peralihan / Penjualan Tanah Pusaka Tinggi.**

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa banyaknya tanah pusaka tinggi yang telah dijual dijadikan oleh *Developer* menjadi komplek perumahan, disamping pemerintah kota memajukan perkembangan fisik kota juga membuka kesempatan bagi Investor untuk menanamkan modalnya sehingga banyak perusahaan *Developer* yang mendapat izin Prinsip dari pemerintah kota.

Tanah pusaka tinggi / tanah ulayat kaum, begitu juga tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari, belum mempunyai sertifikat hak atas tanah. Akibatnya peralihan / penjualan tidak dapat dilakukan dengan balik nama begitu saja seperti halnya jual - beli hak atas tanah yang telah bersertifikat milik perorangan.

Memang ada juga tanah Pusaka Tinggi / Tanah Ulayat kaum yang telah bersertifikat dimana pemegang hak terakhir menjadikan hak milik perorangan yang di haki oleh semua anggota kaumnya, atas nama Mamak Kepala Kaum.

Hasil penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dalam peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi kepada pihak *Developer*, menurut ketentuan undang - undang :

1. Undang - undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria (UUPA).
2. PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah
3. Permendagri No. 5 tahun 1974 tentang ketentuan - ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan.
4. Peraturan Kepala BPB No. 3 tahun 1992 tentang tatacara memperoleh pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah serta penerbitan sertifikatnya.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 tahun 1993 tentang tatacara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
6. PP 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah.

7. Perda No. 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Tk. I Sumatera Barat.
8. SK Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Barat No. 13 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tatakerja BKPMD Tk.I Sumatera Barat.

**4.2.1. Bagi tanah yang telah bersertifikat ada pula 2 cara dalam peralihannya kepada *Developer* yakni ;**

Dengan Cara Pelepasan Hak Atas Tanah.

1. Setelah jual – beli dilakukan di hadapan PPAT, langsung dilakukan pelepasan hak.
2. *Developer* meminta Aspek penatagunaan tanah pada Badan Pertanahan Nasional tentang lokasi apakah bisa digunakan untuk perumahan atau tidak.
3. *Developer* harus memiliki izin lokasi.

Jika luas tanahnya hanya 1 hektar, maka tidak diperlukan izin, tetapi bagi luas tanahnya 1 hektar lebih maka diperluan izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional dan ditanda tangani oleh pemerintah kota dalam hal ini Walikota.

Dalam pemberian izin Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah kota mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait yaitu : Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Tata Ruang Kota dan Tata Bangunan, Infra suil ( PU ), PBB, Camat dan Lurah setempat.

Dalam rapat ini masing - masing Instansi tersebut memberikan masukan, kalau tidak bertentangan dengan fungsi masing – masing Instansi maka diberi izin lokasi pada *Developer* yang bersangkutan. Seandainya izin yang akan diberikan pada *Developer* bertentangan dengan fungsi masing – masing Instansi terkait maka izin lokasi ditolak dengan alasan yang menyangkut fungsi Instansi tersebut.

Misalnya : izin yang diminta telah diperuntukkan pertanian karena lahan tersebut produktif.

4. Dilanjutkan dengan permohonan HGB dalam bentuk Sertifikat Induk, setelah sertifikat diterbitkan baru dilakukan pemecahan hak.

Dalam permohonan HGB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Badan Hukum ( *Developer* ) yaitu :

1. Akta pendirian PT berikut dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.
2. NPWP.
3. TDP.
4. Surat – surat bukti perolehan tanah yang isinya terdiri dari ;
  - a. Surat pernyataan dari pemilik semula ( Kaum ).
  - b. Surat keterangan Lurah.
  - c. Ranji kaum / silsilah keturunan kaum.
  - d. Pelepasan Hak.
  - e. Bukti pembayaran pajak.

5. Fotocopy KTP Direktur dari PT ( *Developer* ).
6. Izin lokasi.
7. Fotocopy Persetujuan bidang usaha dari REEI sebagai anggota.

#### Dengan Cara Penurunan Hak Atas Tanah

Tanah yang telah bersertifikat melalui penurunan Hak yaitu ; Hak milik tersebut menjadi HGB terlebih dahulu, kemudian baru diadakan jual - beli antara pemegang Hak dengan Badan Hukum / PT ( *Developer* ). Setelah ada Akta jual – beli baru dibaliknamakan pada pemegang hak baru ( PT ).

Kemudian PT ( *Developer* ) tersebut mengajukan permohonan Aspek, izin lokasi yang prinsipnya sama dengan yang telah dikemukakan diatas.

Dalam peralihan hak pada konsumen melalui jual – beli, baru diadakan pemecahan Hak atas tanah tersebut.

#### 4.2.2. Bagi Tanah Yang Belum Bersertifikat Dengan Cara :

1. Mamak kepala kaum dan anggota kaum membuat surat pernyataan penguasaan fisik mengenai bidang tanah yang dilengkapi surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menguatkan surat pernyataan tersebut dan ditambah dengan Ranji ( silsilah keturunan ) dari kaum yang bersangkutan yang dibuat oleh Mamak Kepala Kaum, diketahui oleh Penghulu Suku, Lurah beserta Kerapatan Adat Nagari ( KAN ).
2. Dilakukan pengukuran dan sampai diterbitkan surat ukur.

3. Kemudian *Developer* meminta Aspek penatagunaan tanah tentang lokasi pada kantor Badan Pertanahan Nasional dengan syarat – syarat yang telah dikemukakan diatas.
4. Pihak *Developer* mengajukan permohonan pengumuman ke Badan Pertanahan Nasional, pihak Badan Pertanahan Nasional mengadakan suatu pengumuman ke kelurahan setempat yang intinya memberitahukan pada khalayak umum / masyarakat setempat, bahwa bidang tanah adalah kepunyaan dari kaum dan akan dilepaskan hak-nya pada Badan Hukum ( PT ).
5. Dalam pengumuman tersebut diberi kesempatan kepada mereka yang merasa berhak atas tanah tersebut untuk mengajukan keberatan pada Badan Pertanahan Nasional dengan tenggang waktu 60 hari.
6. Bagi yang tidak ada gugatan atau keberatan dilanjutkan dengan pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan kepada Badan Hukum ( *Developer* ).
7. Setelah dilakukan pelepasan hak pada *Developer* baru *Developer* tersebut mengajukan HGB yang masih dalam bentuk Sertifikat Induk, setelah sertifikat keluar baru diadakan pemecahan hak.
8. Bagi tanahnya yang bermasalah atau ada yang keberatan maka pelepasan hak ditangguhkan, menunggu adanya penyelesaian melalui :
  1. Dilimpahkan kepada Ninik – Mamaknya ( Penghulu )
  2. Ke Kelurahan dan Kerapatan Adat Nagari ( KAN )



3. Kalau tidak ada penyelesaian dari kedua lembaga diatas baru melalui Pengadilan Negeri.

Apabila tercapai perdamaian melalui KAN maka putusan dari KAN tersebut dibuat secara tertulis, kemudian dilampirkan dalam warkah Sertifikat dan baru dilakukan pelepasan atau penurunan hak.

#### **4.3. Tanggapan dari Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat**

Meskipun terlambat pemerintah kota Padang menyadari bahwa eksekusi pembangunan di Kota Padang telah terjadi pergeseran nilai, yang selama ini menjadi corak khas masyarakat Minangkabau yang bersifat kekeluargaan yang tinggi menjadi kearah masyarakat yang Individualistik.

Salah satu pendorong terjadinya perubahan nilai – nilai tersebut karena banyaknya tanah baik berupa sawah atau ladang yang semula dikuasai persekutuan Hukum Adat baik oleh bagian atau kaum yang telah beralih pada pihak lain, baik untuk pembangunan perumahan pertokoan dan sarana lainnya, sehingga kepemilikan yang bersifat komunal atas tanah ( yang merupakan ciri khas kepemilikan dalam persekutuan adat Minangkabau ), makin lama makin habis khususnya di kota Padang. Hal ini membawa konsekwensi hilangnya perekat antara anak nagari atau anggota kaum sebab mereka tidak memiliki tanah lagi yang selama ini mereka kerjakan atau pelihara bersama secara turun - temurun.

Menyadari hal tersebut untuk mengembalikan corak masyarakat Hukum Minangkabau Pemerintah Sumatera Barat mengambil kebijaksanaan dengan

membuat Perda No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari, yang menghidupkan kembali Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat ( yang merupakan ciri khas Pemerintah yang terendah di Minangkabau ( dapat dilihat pada lampiran V ), dimana sebelumnya pemerintah Nagari dihapus dengan adanya Undang – undang No. 5 tahun 1979.

Dengan dihidupkan kembali Pemerintahan Nagari diharapkan terpeliharanya kesatuan persekutuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayah Nagari yang di dalamnya adanya hak Ulayat Nagari dan hak persekutuan kaum berupa tanah pusaka tinggi.

Disamping itu untuk menjaga keutuhan masyarakat persekutuan hukum adat apabila terjadi sengketa tentang sako dan pusaka di upayakan penyelesaiannya melalui lembaga adat dengan putusan perdamaian dan apabila tidak tercapai maka melalui Pengadilan Negeri.

Pemerintah Kota Padang juga menyadari bahwa pemerintah sepenuhnya tidak dapat menghalangi apabila ada suatu kaum yang hendak menjual harta pusaknya, akan tetapi pemerintah kota bersama dengan lembaga kerapatan adat Minangkabau, memberikan pengertian kepada Ninik Mamak tentang akibat apabila harta pusaka di jual dan juga menghimbau, apabila terpaksa menjual tanah pusaknya di carikan penggantinya dengan tanah di tempat lain. Sehingga tali pengikat antara anggota kaum Mamak kepada kaum tetap terpelihara, sehingga rasa kekeluargaan yang menjadi ciri khas di Minangkabau tetap terpelihara.

#### **4.4 Dampak Positif dan Negatif terhadap dijualnya pusaka tinggi oleh kaumnya.**

##### **4.4.1 Dampak Positif**

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kota Padang, maka kebutuhan adanya perumahan dan sarana lainnya, akan meningkat. Di wilayah kota Padang, tanah – tanah yang masih kosong pada umumnya dimiliki oleh Persekutuan kaum baik berupa sawah atau ladang yang telah dikuasai secara turun – temurun ( tanah harta pusaka )

Menurut adat Minangkabau hampir tidak mungkin tanah pusaka yang dimiliki oleh persekutuan beralih pada pihak lain ( diluar anggota kaum ). Karena harus memenuhi syarat – syarat yang sangat ketat, selain adanya kesepakatan seluruh anggota kaum tetapi juga mempunyai alasan yang telah ditentukan dalam adat, dan tanpa persyaratan tersebut tidak dibenarkan untuk mengalihkan harta pusaka, karena hal tersebut sangat memalukan bagi anggota kaum.

Didalam perkembangannya . peralihan tanah pusaka hanya berdasarkan kesepakatan anggota kaum tanpa alasan pembenar ( alasan yang ditentukan dalam adat ) karena tingginya nilai jual tanah yang mendorong suatu kaum untuk menjual / melepas tanah pusaknya, dengan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah – tanah pusaka yang telah dijual pada pihak lain selanjutnya di peruntukkan untuk pembangunan perumahan baik oleh *developer* atau perorangan dan sarana lainnya seperti : perkantoran, pertokoan dan sebagainya.

Dari hasil penelitian penulis sejak tahun 1994 sampai 2001 telah ada 74 lingkungan perumahan yang dibangun oleh *developer* yang tanahnya semula berasal dari tanah harta pusaka tinggi, dan rata – rata tiap lingkungan perumahan dibangun berkisar antara 100 sampai 300 buah rumah dengan berbagai tipe. Sehingga sejak tahun 1994 sampai dengan 2001 pertambahan perumahan  $\pm$  200.000 buah rumah. Dan belum lagi dibangun secara pribadi, dengan adanya kemauan dari suatu kaum yang menjual tanah pusakanya yang di jual untuk pembangunan telah ikut membantu melancarkan program pemerintah di bidang perumahan.

#### 4.4.2. Dampak Negatif

Tanah pusaka di Minangkabau merupakan lambang kebesaran suatu kaum, dan juga membanggakan anggota kaum, makin luas tanah pusaka yang dimiliki oleh suatu kaum semakin dihormati kaum tersebut. Sehingga merupakan hal yang memalukan bagi suatu kaum apabila menjual harta pusakanya kecuali dalam hal / syarat yang dibolehkan menurut adat.

Semenjak terjadi banyaknya peralihan tanah pusaka tinggi persekutuan adat Minangkabau ( Matrilineal. ) ke tangan pengusaha untuk menjadi lahan perumahan, ternyata mengakibatkan interaksi sosial dalam pola hubungan Mamak - kemenakan menjadi renggang / hilang, hampir semua reponden kakak / adik perempuan dan mamak – kemenakan mengaku jarang sekali malah / tidak setahun sekali Mamak mengunjungi kemenakan atau kemenakan mengunjungi Mamak.

Menurut responden hal ini disebabkan karena Mamak tidak lagi bertanggung jawab pada kemenakan dan tidak memikirkan kehidupan ekonomi kemenakannya. Para mamak hanya sibuk memikirkan kehidupan ekonomi keluarganya ( anak istrinya ). Mamak tidak dapat lagi dijadikan tulang punggung anak kemenakannya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Sehingga fatwa adat ikut berubah yang dahulunya anak dipangku kemenakan di bimbing, sekarang berubah anak di pangku kemenakan di jinjing.

Menurut informasi dari kelompok mamak mengaku, mengalami kehilangan wibawanya di dalam pandangan para kemenakannya di banding sebelum di jual tanah harta pusakanya. Para mamak ini banyak melakukan aktifitas kehidupan sosial dalam lingkungan anak – istrinya dan para kemenakan tidak lagi minta fatwa atau nasehat – nasehat kepada mamaknya. Para mamak ini mengakui waktu melakukan peralihan / menjual tanah harta pusaka kaumnya tidak menghiraukan malah tidak mempercayai lagi sumpah pasitiran dari nenek moyang yang telah mewariskan tanah pusaka kepadanya guna untuk mengayomi kesejahteraan anak cucu mereka di kemudian hari. Setelah tanah pusakanya di lepas / dijual para mamak tersebut merasa dirinya terkena kutukan, karena telah melanggar sumpah pasitiran dan merasa bersalah serta melakukan pengkhianatan terhadap kemenakannya. Yang mana hasil dari penjualan tanah pusaka tersebut tidak dapat di manfaatkan karena dari hasil penjualan di bagi rata diantara anggota kaum, semakin banyak anggota kaum itu semakin sedikit bagian yang mereka peroleh.

Bagi sesama anggota kaum itu sendiri juga mengakibatkan menipisnya rasa kekeluargaan yang dulu sangat kental, ini disebabkan tanah pusaka yang merupakan alat perekat bathin di antara anggota kaum tidak ada lagi. Begitu juga bagi anggota kaum yang berada di perantauan menjadi malas atau enggan untuk pulang karena tidak ada lagi lambang kebesaran dan kemakmuran kaum tersebut.

Menurut H Nurullah Datuk Perpatih Nan Tuo SH MM, salah seorang Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Sumatera Barat dan juga seorang dosen di Universitas Andalas Padang. Memang sejak adanya kompleks perumahan yang dibangun *Developer*, kota pada telah jauh berubah dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Dimana dulunya di kota Padang banyak di temui sawah dan ladang bengkuang, sekarang sudah berubah menjadi kawasan perumahan, tetapi akibat pembangunan tersebut terjadi perobahan pola pikir mamak / penghulu – penghulu kaum di kota Padang. Menjadi seorang Individualistis dan materialistis, sehingga lupa akan tanggung jawab sebagai mamak / penghulu hanya karena di dorong oleh harga tanah yang tinggi, sehingga banyak mamak yang ingin menjual tanah pusaka kaumnya tanpa memikirkan akibatnya. Akibat dari penjualan tanah pusaka kaumnya oleh mamak dan anggota kaum tersebut. Kehidupan ekonomi mereka bukannya berubah menjadi lebih makmur, malah menjadikan mereka lebih melarat. Jika dilihat dari status sosial menurut adat, kaum yang memiliki pusaka yang luas berarti kaum tersebut berstatus sosial yang tinggi, sekarang dengan dijualnya tanah pusaka sehingga mengakibatkan status sosial jauh lebih rendah dari masyarakat / kaum yang tidak memiliki tanah pusaka. Melihat kenyataan ini para pemuka adat sangat prihatin

melihat orang kaya yang miskin ditanahnya sendiri / dikampung halamannya. Kalau hal ini dibiarkan terus akan berakibat akan hilangnya salah satu dari nilai – nilai budaya di Minangkabau dari segi struktur kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Khususnya harta pusaka tinggi sebagaimana yang telah dialami Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat Suku di beberapa daerah di Minangkabau telah habis akibat dari perkembangan jaman.

#### **4.5. Analisis**

##### **4.5.1. Analisis Terhadap Alasan – Alasan Penjualan Tanah Pusaka Tinggi**

Apabila menilik kepada ketentuan adat Minangkabau, maka penjualan tanah pusaka tinggi sangat sulit malah tidak ada kemungkinan untuk menjual tanah pusaknya oleh suatu kaum kecuali dalam keadaan yang sangat darurat sifatnya seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. Mayik tabujua di tengah rumah ( mayat terbujur di tengah rumah )
2. Rumah gadang katirisan ( rumah gadang katirisan )
3. Gadih gadang alun balaki ( gadis Padang belum kawin )
4. Mambangkik Batang Tarandam ( Adat pusaka tidak berdiri )

Tetapi kenyataannya sekarang tidak satupun ketentuan adat diatas yang digunakan sebagai alasan tepat ataupun dalih untuk menjual tanah pusaka tinggi kepada developer untuk pembangunan rumah dalam situasi terakhir ini.

Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat matrilineal dilokasi penelitian bersedia menjual / mengalihkan tanah pusaka tinggi mereka kepada pengusaha *property* ( *Developer* ).

Bila dipilah, alasan tersebut mencakup 2 faktor :

#### **4.5.2. Faktor Internal**

##### **4.5.2.1 Alasan Ekonomis**

Keadaan perekonomianlah yang menyebabkan anggota persekutuan pemilik tanah pusaka tinggi setempat bersedia menjual tanah pusaknya kepada pengusaha perumahan / *Developer*. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada mulanya tingkat perekonomian anggota Kaum pemilik tanah setempat tidak begitu rendah, persediaan tanah memenuhi kebutuhan hidup anggota kaumnya, sehingga mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Sejarah telah membuktikan pada saat penjajahan Jepang dan masa agresi Belanda, mereka atau persekutuan adat Matrilineal yang memiliki tanah pusaka tinggi tidak pernah mengalami kekurangan pangan sebagaimana yang dialami masyarakat persekutuan matrilineal yang tidak memiliki tanah pusaka atau masyarakat pendatang.

Namun realita hidup yang modern cenderung mendorong manusia ke dalam pola hidup konsumtif dengan ukuran serba materialistis membuat masyarakat awam bahkan masyarakat terdidik selalu merasa kekurangan dan benda yang ditawarkan oleh lingkungan sekarang itu salah satu yang menjadi penyebab masyarakat atau anggota kaum tidak menghiraukan akan kebutuhan generasi berikutnya. Dengan



menjual tanah pusakanya diperkirakan bisa merubah kehidupan mereka dengan uang hasil penjualan tanah pusaka tersebut, mereka dapat membuka usaha tetapi kenyataannya setelah tanah pusaka Kaumnya dijual hasil penjualan tersebut dibagi – bagikan kepada anggota kaum, pada waktu dijual uangnya memang banyak tetapi karena anggota kaum banyak maka uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi sama rata dengan semua anggota kaum. Ternyata masing – masing anggota kaum mendapat uang bagian sangat sedikit hanya Rp. 2.500.000. Dengan uang yang sedikit itu tidak cukup dijadikan modal usaha, akhirnya uang hasil penjualan tanah pusaka tersebut dibelikan untuk hal yang konsumtif dari alasan tersebut diatas menampakkan terjadinya pergeseran nilai – nilai yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat persekutuan Minangkabau.

#### **4.5.2.2 Alasan yang bersifat tanggung jawab moral anggota kaum terhadap pemimpin kaumnya**

Hasil penelitian menunjukkan, sebagian masyarakat / anggota kaum masih memegang teguh adat dimana perasaan sehina semalu merupakan tanggung jawab moral terhadap anggota kaum (Kepada Mamak Kepala Kaum, dalil – dalil mengemukakan :

1. Bahwa harta pusaka itu adalah harta yang diterima secara berurutan dari Mamak ke Ninik seterusnya keatas.

2. Bahwa hati seseorang telah dicondongkan oleh Allah kepada kepada kemenakan, oleh karenanya tidak sampai hati untuk memberikannya kepada orang yang dikasihinya ( anaknya ).
3. Bahwa kemenakan memelihara Mamak dalam keadaan susah atau senang dan membayarkan hutang – hutangnya, sedangkan anak tidak berbuat demikian. Oleh sebab itu sebagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakan dan tidak kepada anak.

Disamping itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian dari Mamak atau pemimpin kaum berpendapat bahwa semakin lama anak kemenakan berkembang dan anggota kaum akan bertambah banyak, sedangkan tanah pusaka semakin berkurang luasnya karena sebagian sudah dibangun oleh anak – kemenakan untuk tempat tinggal, daripada menimbulkan masalah dikemudian hari atau akan menyebabkan saling bunuh – bunuhan sesama anggota kaum, lebih baik dijual. Sedangkan ajaran adat Minangkabau menghendaki bahwa mamak kepala kaum yang dipilih harus bermutu tinggi, orang yang bermutu tinggi adalah orang yang berbudi, maksudnya bahwa dia sanggup memikirkan hari depan anak – kemenakannya dikemudian hari, sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan pedoman atau kehilangan pegangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Disamping itu seorang mamak kepala kaum mempunyai tanggung jawab terhadap nilai – nilai atau warisan – warisan nenek moyangnya, dimana ia harus bertanggung jawab terhadap masa lampau, terhadap masa kini dan masa yang akan datang. Tanggung jawab masa lampau maksudnya ialah ninik moyang yang berbudi halus itu telah mewariskan kepada anak

kemenakannya berupa benda maupun nilai – nilai yang berguna untuk generasi sekarang. Diantaranya benda yang diwariskan itu ialah tanah pusaka tinggi. Generasi sekarang harus bertanggung jawab untuk memelihara, mempertahankan dan mewariskannya pada generasi berikutnya. Apabila tanggung jawab tersebut diabaikan akan mengakibatkan kesengsaraan bagi anak kemenakan, maupun dirinya sendiri. Tanggung jawab masa kini maksudnya, generasi sekarang wajib mempertahankan tanah pusakanya dengan cara mempelajari dan mendalami ajaran adat mengenai tanah pusaka, disamping itu generasi sekarang tidak boleh meninggalkan masalah / persoalan yang akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Seperti halnya apabila tanah pusaka kaumnya dalam keadaan sengketa atau tergadai kepada orang lain maka generasi sekarang berkewajiban menyelesaikannya / menebus harta pusakanya.

Bila menilik dari alasan diatas menunjukkan bahwa mamak sekarang tidak lagi mau memegang dan mengemban tanggung jawab yang telah diwariskan oleh niniknya dan dari ajaran adat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi sekarang ( Mamak Kepala Kaum sekarang ) tidak bisa mengemban tanggung jawab yang di serahkan kepadanya, sehingga ia telah meninggalkan atau mewariskan permasalahan yang akan dipikul oleh generasi yang akan datang serta Mamak sekarang yang telah menjual tanah pusakanya berarti ia telah memakan hak generasi yang akan datang.

#### 4.5.3. Faktor Eksternal

Pembangunan yang pesat terutama perkembangan fisik kota banyak ditentukan oleh kemudahan – kemudahan prasarana yang ada serta kemudahan – kemudahan dalam proses pembebasan tanah, kenyataan ini telah menyebabkan perambatan lahan terbangun menjadi perumahan dan banyaknya penjualan / peralihan tanah pusaka persekutuan adat matrilineal, dikhawatirkan gejala ini akan menghilangkan dasar – dasar kesatuan hidup sosial masyarakat persekutuan. Pembangunan yang semarak hanya berorientasi pada angka – angka pertumbuhan ekonomi secara makroyang tidak diimbangi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Undang – Undang Pokok Agraria Indonesia dengan segala peraturan yang menjabarkannya berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum lebih dulu berjalan didepan mendahului norma – norma informal ( mores ). Hilangnya rasa takut akan akibat pelanggaran terhadap sumpah pasitiran dapat dipandang dari teori rasionalitas Weber yang menganggap bila kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan yang rasional maka proses hukum dalam masyarakat akan mengalami rasionalisasi. Memang sulit untuk secara rasional mencapai benang merah antara pranata social kekerabatan matrilineal dengan pranata pemerintahan yang ada dan berakibat terhadap perubahan sosial.

Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan Mamak kemenakan justru dibiarkan mendangkal untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang lebih besar dan lambat laun dapat pula tumbuh jadi mores atau nilai – nilai informal.

#### **4.6. Analisis Terhadap pola penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi**

Pola penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi yang telah diuraikan dimuka mengacu kepada dua sistem hukum yakni hukum Agraria dan hukum Adat, sehingga terjadi dualisme hukum. Dalam penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi tidak selalu dilakukan secara musyawarah untuk mendapat persetujuan dari anggota lainnya oleh Mamak kepala kaum. Pembebasan tanah melalui penjualan / pelepasan tanah yang demikian adalah merupakan bersifat keperdataan dan menurut ketentuan adat kaum namun ada juga yang melakukan dengan penipuan atau pemalsuan tanda tangan oleh pemimpin kaumnya, karena menurut ketentuan adat tanah pusaka kaum hanya boleh dialihkan, maksudnya digadaikan tetapi tidak untuk dijual. Dengan pemalsuan tanda tangan oleh mamak kepala kaum agar dalam penjualan tanah pusaka kaumnya memenuhi syarat baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata tentang setujunya para pihak ( orang yang berhak terhadap objek tersebut ) maka lahirilah surat pernyataan pelepasan hak dari pemilik, selanjutnya dibawa ke PPAT untuk dibuatkan Akta jual – beli tanahnya.

Dari hasil penelitian mamak kepala kaum mensertifikatkan tanahnya hanya bertujuan untuk menjual bukan untuk semata – mata sebagai bukti pemilikan hak atas

tanah. Karena dalam pensertifikatan tanah diperlukan persetujuan dari seluruh anggota kaum untuk memberikan kuasa kepada mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum, sehingga dalam sertifikat hanya tercantum nama mamak kepala kaum atas nama anggota kaum, dalam hal ini KAN hanya berperan sebagai lembaga adat yang memberikan pengakuan pada pemerintah ( Badan Pertanahan Nasional ) bahwa tanah yang tersebut memang milik kaum yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh penghulu – penghulu suku dalam nagari. Apabila mamak kepala kaum menjual tanah pusakanya hanya diperlukan tanda tangan anggota kaum sebagai pemberian persetujuan kepada mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusakanya, dengan adanya persetujuan dari anggota kaum berarti jual beli tanah pusaka sudah sah.

Setelah sertifikat diterbitkan tetapi dalam penjualan tanah pusakanya , penghulu – penghulu suku dalam nagari ( lembaga KAN ) tidak dilibatkan atau diikutsertakan sedangkan menurut ketentuan adat dan kenyataan sehari – hari apabila ada masalah / persoalan dalam nagari baik dalam hal masalah sosial maupun masalah harta pusaka diselesaikan didalam kerapatan adat nagari ( KAN ) dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kalau dilihat dari hasil penelitian, begitu mudahnya terjadi penjualan / peralihan tanah pusaka suatu kaum apabila anggota kaum telah menyetujui yang dibuktikan dengan tanda tangan dari anggota kaum. Bagaimana jika anggota kaum tersebut kebanyakan tidak memiliki pendidikan formal sebagaimana dari hasil

penelitian, pada umumnya anggota kaum tidak berpendidikan, disini terjadi pembodohan anggota kaum oleh pemimpin kaum ( mamak kepala kaum ). Dari hasil penelitian putusan pengadilan juga terjadi salah mengartikan makna dari ganggam bauntuak oleh masyarakat Minang dan hakim sekarang ini dimana menurut adat makna dari ganggam bauntuak dari pusaka kaum oleh suatu paruik / jurai adalah hanya hak menikmati hasil dari pusaka tinggi / pusaka kaum dan bukan untuk dimiliki, walaupun sudah disertifikatkan oleh paruik / jurai tersebut atas nama mamak kepala kaum , tetapi paruik / jurai yang lain yang telah mendapat ganggam bauntuak masih berhak atas tanah itu dan masih memiliki tanah tersebut karena pada hakikatnya tanah pusaka tinggi / pusaka kaum tersebut dalam kewarisannya tetap utuh dan dalam keadaan tidak terbagi. Lihat lampiran IV tentang putusan pengadilan yang mensahkan perikatan jual beli yang dilakukan oleh mamak kepala kaum dan lampiran 4 tentang putusan pengadilan yang salah mengartikan ganggam bauntuak yang diberikan pada anggota paruik / jurai sehingga dalam pembagian ganggam bauntuak anggota paruik / jurai yang lain dianggap tidak sepusaka lagi yang mengakibatkan menurut hukum adat mereka tidak sekaum.

#### **4.7. Analisis Dampak Positif dan Negatif terhadap dijualnya tanah pusaka Tinggi terhadap kaum**

Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat, perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat persekutuan Minangkabau. Adanya ketentuan adat sebagai

upaya untuk mempertahankan nilai – nilai adat matrilineal begitu juga fatwa adat “ adat nan ndak lakang dek paneh, nan ndak lapuak dek hujan.” namun dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membawa pengaruh pada pola pikir masyarakat persekutuan adat di kota Padang.

Pemerintah kota melaksanakan pembangunan dalam rangka menjalankan program pemerintah, tanpa memikirkan ekses dari pembangunan itu sendiri masyarakat persekutuan maupun nilai – nilai adat, dimana pemerintah kota tidak ikut melestarikan nilai – nilai adat tentang konsep struktur penguasaan tanah di Minangkabau. Kalau keadaan ini terus berlanjut maka masyarakat persekutuan matrilineal akan kehilangan satu lagi struktur penguasaan tanah pusaka di Minangkabau sebagaimana seperti hak Ulayat nagari maupun hak Ulayat suku akibat dari perkembangan jaman.

Menurut ketentuan adat pelaksanaan pemerintahan di Minangkabau dikenal dengan tali bapilin tigo yakni adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Maksudnya pemerintahan di Minangkabau ada 3 unsur yang memimpin masyarakat persekutuan, yakni dari unsur pemerintah sendiri, unsur alim ulama, unsur cerdik pandai ( pemimpin pemimpin adat ). Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan, harus memperhatikan nilai - nilai agama dan nilai – nilai adat.

Menurut hasil penelitian pemerintah hanya lebih mengutamakan pembangunan. Nilai adat dikesampingkan atau di nomor duakan karena nilai – nilai adat dianggap dapat menghambat pembangunan. Apabila pemerintah akan melaksanakan pembangunan akan terbentur dengan tanah pusaka. Kalau pemerintah



mengkaji lebih dalam lagi makna dari ketentuan adat itu tidak akan menghambat pembangunan hanya saja cara pengelolaannya / pengalihannya yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Adanya larangan ketat menurut adat terhadap penjualan / peralihan tanah pusaka tinggi yang tertuang dalam pepatah adat yang telah dikemukakan diatas, dimaksudkan untuk menjaga kehidupan anak kemenakan di kemudian hari, tetapi pemikiran yang demikian tidak lagi dipertahankan oleh mamak dimana ekonomi anak kemenakan untuk generasi berikutnya dianggap tidak penting lagi, dalam hal ini terjadi persegeran nilai – nilai adat yang kental rasa persaudaraannya / kekeluargaannya mengarah pada corak individualistis.

Seorang mamak atau pemimpin kaum di Minangkabau mempunyai tanggung jawab besar, disamping ia bertanggung jawab kepada anak istrinya, ia juga berkewajiban memikul ekonomi sosial anak kemenakannya begitu juga terhadap orang sekampungnya, seperti pepatah adat mengatakan : anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan juga.

Hasil penelitian menunjukkan setelah tanah pusaka kaumnya dijual, terabaikan pola hubungan mamak – kemenakan. Rutinitas kunjungan yang dilakukan mamak ke rumah kemenakan dan sebaliknya kemenakan ke rumah mamak tidak ada lagi, rasa tanggung jawab mamak kepada kemenakan sudah pudar dipengaruhi kehidupan modern yang individual. Maraknya pembangunan perumahan yang mengakibatkan banyaknya tanah harta pusaka tinggi / pusaka kaum yang beralih dan berubah menjadi kompleks perumahan mempengaruhi pada corak pelapisan sosial

yang beraneka ragam. Terjadinya kepincangan dalam pemerataan ekonomi dimana sebagian anggota kaum semakin terpinggir karena ketidakmampuan ekonominya akibat dari tidak adanya lahan yang akan digarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **4.8. Analisis Tanggapan dari Tokoh Pemerintah kota dan Tokoh Masyarakat**

Terlambatnya pemerintah kota menyadari eksis dari pembangunan di kota Padang yang berakibat pada pergeseran nilai terhadap pola hubungan kekerabatan mamak kemenakan dan hubungan hukum antara mamak sebagai *tungganai* dengan harta pusaka kaumnya. Seorang mamak menurut ketentuan adat kedudukannya hanya banyak bersifat lambang dan sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini pemerintah kota tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena program pembangunan banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat kadangkala berbenturan dengan nilai – nilai adat masyarakat persekutuan matrilineal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, hanya berpedoman kepada hubungan hukum perdata, yakni dalam peralihan tanah, dimana proses peralihan tanah banyak mengacu pada peralihan hak milik perorangan maupun hak milik yang diperoleh melalui warisan sistem hukum perdata yang jauh berbeda dengan peralihan hak atas tanah adat masyarakat persekutuan matrilineal. Menurut hukum perdata, peralihan tanah milik perseorangan maupun melalui pewarisan, si pemilik / ahli waris bebas menentukan kehendaknya terhadap tanah miliknya. Sedangkan menurut hukum adat matrilineal,

tanah yang diperoleh melalui pewarisan dari ninik moyangnya yaitu berupa tanah pusaka kaum / pusaka tinggi tidak boleh dialihkan atau dijual diluar ketentuan adat, ia hanya memperoleh hak menikmati, dan semua anggota kaum berhak atas tanah pusaka tersebut termasuk generasi akan datang.

Dengan adanya reformasi, pemerintah pusat telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah berdasarkan undang – undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kesempatan ini tidak disia – siakan oleh pemerintah daerah dalam menata kembali bentuk susunan pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang lebih dikenal masyarakat Minangkabau yang mana bentuk pemerintahan tertinggi berbentuk nagari dan kampuang bagian pemerintah yang terkecil.

Pemerintah daerah Sumatera Barat dalam menata kembali pemerintahan nagari dengan mengeluarkan Peraturan daerah propinsi Sumatera Barat Nomor : 9 tahun 2000 tentang pokok pemerintahan nagari.

Tujuan dari Perda itu sendiri dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi sosial budaya masyarakat Minangkabau yang selama ini dipinggirkan dan terabaikan. Dengan kembalinya pemerintahan Nagari dengan sendirinya Lembaga Adat Nagari / Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) difungsikan lagi yang bertugas memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari.

Hasil wawancara penulis dengan pemerintah kota dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( LKAAM ) mengatakan bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sekarang sering mengadakan seminar tentang program pembangunan dan kelestarian budaya agar tidak terjadi benturan antara pembangunan dengan adat. Sehingga pembangunan tidak terhambat dan adat budaya tetap terjaga.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melihat secara nyata eksekusi dari pembangunan selama ini yang mengakibatkan rusaknya nilai – nilai adat dan yang lebih memprihatinkan keadaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat persekutuan adat yang telah terlanjur menjual tanah pusakanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Menurut adat Minangkabau, struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah terdiri dari :

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Pusaka Tinggi
4. Tanah Pusaka Rendah

Dalam perkembangannya, baik karena perkembangan penduduk ataupun pembukaan lahan oleh investor untuk perkebunan kelapa sawit, kopi, karet dan pembukaan lahan untuk transmigrasi di Sumatera Barat hampir habis, demikian juga tanah Pusaka Tinggi terutama di kota – kota telah banyak beralih kepada pihak lain.

Tanah Pusaka Tinggi, tanah yang dimiliki oleh suatu kaum ( kelompok masyarakat hukum adat yang terkecil yang satu keturunan berasal dari satu Ibu ), yang telah turun temurun, sehingga susah dibuktikan asal usulnya secara tegas yang pengawasannya berada ditangan mamak kepala kaum ( mamak kepala waris ), dan di peruntukkan untuk kesejahteraan seluruh anggota kaum.

Tanah Pusaka Tinggi di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang ( objek penelitian ) juga telah banyak beralih kepada pihak lain, yang dipergunakan untuk lingkungan lokasi perumahan, pertokoan, perkantoran atau sarana lainnya.

Pada prinsipnya menurut hukum adat Minangkabau tanah pusaka tinggi sangat selektif untuk dapat dipindahtangankan, selain kesepakatan seluruh anggota kaum juga harus ada alasan pemberat ( alternatif ).

1. Rumah Gadang Warisan.
2. Adat pusaka tidak berdiri, untuk penyelenggaraan pemberian gelar adat.
3. Mayat terbujur ditengah rumah, tidak ada biaya untuk penyelenggaraan pemakaman.
4. Gadis gadang belum bersuami, untuk mendapatkan jodoh dan penyelenggaraan pestanya.

Sebab suatu kaum sangat malu apabila tanah pusakanya dijual kepada orang lain.

Dalam perkembangannya suatu kaum tidak lagi menginginkan alasan pemberat tersebut, dan suatu kaum menjual dengan alasan untuk mendapatkan uang karena pola hidup yang telah mulai konsumtif. Karena harga yang tinggi, akan tetapi kenyataannya masing – masing anggota kaum hanya memperoleh pembagian yang tidak berarti sebab anggota kaum yang banyak.

Alasan – alasan anggota kaum menjual tanah pusakanya :

1. Untuk pembayaran hutang mamak kepala kaum karena pada pihak lain, karena anggota kaum merasa bertanggung jawab moral atas utang mamak kepala kaum.

2. Alasan ekonomi yang ingin merubah tingkat kesejahteraan anggota kaum karena dari hasil penjualan tanah pusaka dapat dijadikan modal usaha oleh anggota kaum.

Dimana prosedur penjualan tanah harta pusaka tinggi mengacu kepada dua sistem hukum yakni :

1. Menurut hukum agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mana sebelum tanah tersebut dijual terlebih dahulu harus didaftarkan pada Kantor BPN setempat untuk kepentingan pensertifikatan tanah, agar mudah dalam penjualan hak atas tanah tersebut.
2. Menurut hukum adat dengan kedudukan dan kewenangan mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaum maka di dalam sertifikat hanya yang dicantumkan nama mamak kepala kaum yang bertindak atas anggota kaum, sehingga dalam penjualannya anggota kaum cukup memberikan persetujuan untuk menjual harta pusaknya.

Dampak negatif dari penjualan tanah harta pusaka tinggi persekutuan adat berarti telah ikut membantu program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan dampak negatifnya hilangnya sendi atau tali perekat batin anggota kaum itu sendiri yang berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat persekutuan matrilineal yang bersifat kekeluargaan menuju individualistis.

Tanggapan pemerintah kota dan masyarakat adat matrilineal eksekutif dari pembangunan perumahan banyak terjadi penjualan tanah pusaka tinggi kepada developer yang telah mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dimana

terjadinya pendangkalan pola hubungan mamak kemenakan dengan adanya Perda tentang ketentuan pokok kembali kepada pemerintahan nagari diharapkan pemerintah dan pemuka adat menata kembali nilai-nilai adat yang telah terabaikan selama ini

Dari hasil penelitian terhadap suatu kaum yang telah menjual tanah pusakanya berupa tanah, selain hilangnya lapangan kerja sebagai tambahan pendapatan, tetapi yang lebih penting telah mulai hilangnya rasa kekeluargaan / solidaritas diantara sesama anggota kaum, karena fungsi tanah pusaka yang selama ini menjadi perekat rasa kekeluargaan telah tidak ada lagi, tidak ada lagi rasa kebanggaan sebagai penduduk asli Minangkabau yang ditandai mempunyai tanah pusaka.

Dampak yang lebih luas adalah tidak ada lagi rasa kebanggaan sebagai penduduk asli Minangkabau karena tidak mempunyai tanah pusaka.

Dampak lainnya karena Tanah Pusaka telah dijual, tidak tersedia lagi lahan untuk lokasi perumahan untuk anggota kaum / generasi kaum selanjutnya, sehingga mereka terpaksa menumpang hidup di tanah orang lain atau membeli tanah di lokasi di pinggir kota. Akhirnya mereka menjadi tamu di daerah asalnya sendiri.

Dengan adanya kaum yang mau menjual tanah pusakanya untuk dijadikan lokasi komplek perumahan, perkantoran dan sarana lainnya dengan sendirinya secara tidak langsung kaum tersebut telah ikut membantu pemerintah di bidang pembangunan perumahan / property.



## 5.2. Saran – Saran

Keberadaan tanah pusaka di Sumatera Barat ( Minangkabau ) menurut hemat penulis masih perlu dipertahankan sesuai dengan sifat kekerabatan matrilineal yang bersifat turun - temurun yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota kaum dibawah pengawasan mamak kepala kaum. Dan keberadaan tanah pusaka merupakan unsur yang menandakan seseorang itu penduduk asli Minangkabau disamping ia memiliki rumah gadang, pada perkuburan, gelar Sako dan juga tanah pusaka itu merupakan

kebanggaan dari suatu kaum serta sebagai alat perekat batin sesama anggota kaum.

Untuk itu :

1. Apabila suatu kaum ingin menjual tanah pusakanya hendaknya menjadi tuan rumah dikampung halamannya, jangan sampai mereka terpinggirkan karena masuknya pendatang / penduduk baru, untuk itu haruslah dilakukan secara selektif antara lain :
  - a. Apabila tanah pusaka itu dijual adalah untuk kepentingan pembangunan / membantu pemerintah / unsur kepentingan sosial.
  - b. Dalam menjual tanah tersebut betul – betul berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum, jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari yang akan merusak keutuhan kaum itu sendiri.
  - c. Sedapat mungkin jangan dijual tanah / lahan produktif ( sawah, ladang, tambak dan sebagainya ), dan apabila terpaksa harus dijual kemudian

dibelian penggantinya di tempat lain, sehingga kaum tersebut masih memiliki tanah pusaka.

2. Apabila tanah yang dijual tersebut dijadikan lokasi industri diutamakan / di beri kesempatan pada anggota kaum untuk menjadi karyawan, sehingga mereka mempunyai lapangan pekerjaan yang dapat menjamin kehidupannya untuk mengantisipasi dampak sosial karena tanah mereka yang merupakan lapangan pekerjaan telah berpindah tangan.
3. Apabila tanah pusaka itu dijual untuk lokasi lingkungan perumahan maka Developer hendaknya menyediakan lahan tempat lain anggota kaum tersebut berusaha berupa toko / warung.
4. Dalam penjualan tanah pusaka hendaknya dilibatkan peranan dari *Kerapatan Adat Nagari* ( KAN ) sebatas sebagai penasihat yang memberikan pengertian pada suatu kaum tentang akibat dari penjualan tanah pusaknya, terhadap kaum dan generasi berikutnya.
5. Kepada pemerintah kota dengan adanya otonomi daerah disamping adanya Perda No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari hendaknya pemerintah kota juga membuat Perda tentang ketentuan cara peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi kepada pengusaha perumahan / *Developer* agar anggota kaum yang menjual tanahnya menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri dan dalam menjalankan usahanya tidak ada persaingan dengan warga penduduk komplek perumahan seperti : adanya ketentuan bagi konsumen / pembeli perumahan agar rumah yang dibelinya hanya di peruntukkan sebagai tempat tinggal dan tidak untuk usaha disamping tempat tinggalnya.

ketentuan adat secara limitatif, tetapi dalam kenyataannya peralihan tanah tersebut begitu mudah dan bertentangan dengan ketentuan adat.

Saran : Boleh saja kaum menjual tanah pusakanya, apabila untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial, tetapi hasil penjualan tanah pusaka tersebut dibelikan lagi tanah untuk pengganti tanah pusaka yang dijual di daerah lain. Dan dalam penjualan tanah pusaka kaum hendaknya pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam peralihanya yaitu dengan ketentuan Peraturan Daerah agar anggota kaum tersebut dapat menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri, jangan sampai mereka terpinggirkan dan terabaikan.

## RINGKASAN

Pesatnya pembangunan perumahan di Sumatera Barat khususnya di Minangkabau menyebabkan nilai tanah menjadi naik sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat persekutuan Minangkabau terutama mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaumnya tidak lagi ikut memikirkan sosial ekonomi anggota kaumnya.

Banyaknya tanah pusaka kaum / pusaka tinggi yang telah beralih kepemilikannya oleh mamak dijual kepada pengusaha perumahan ( *Developer* ) mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota kaumnya. Dimana dalam peralihannya bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau, karena tanah pusaka milik semua anggota kaum dan bagi anggota kaum yang mengelola tanah pusaka hanya hak menikmati saja.

Dalam peralihan / penjualan tanah pusaka kaum / pusaka tinggi menimbulkan masalah sehingga adanya mamak kepala kaum digugat oleh anggota kaumnya , karena dalam penjualan tanah pusaka tersebut tidak semua anggota kaum diikutsertakan dan juga tidak dengan musyawarah dengan semua anggota kaum.

Banyaknya permasalahan tanah pusaka kaum di Minangkabau penulis tertarik melakukan penelitian. Untuk tesis penulis tentang masalah tanah pusaka di Minangkabau dengan judul “ Dampak Penjualan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum di Kota Padang ” dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Padang Utara dengan perumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pola prosedur melepaskan atau menjual tanah pusaka tinggi ?
2. Mengapa persekutuan hukum adat matrilineal / kaum di Minangkabau mau melepas tanah pusaka tingginya ?
3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap dijualnya tanah pusaka tinggi ?
4. Bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di kota Padang terhadap dijualnya / pelepasan tanah pusaka tinggi ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan – alasan penyebab persekutuan hukum adat / kaum menjual tanah pusaka tingginya pada *Developer*.
2. Untuk mengetahui syarat – syarat atau langkah apakah yang ditempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah pusaka tinggi dan bagaimana pola / prosedur peralihan atau pelepasan.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif akibat dijual / dilepasnya tanah harta pusaka tinggi bagi kaum yang bersangkutan maupun masyarakat luas di Minangkabau dari aspek sosial serta aspek ekonomi.
4. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat persekutuan adat di Minangkabau terhadap dijual / pelepasan tanah pusaka tinggi.

Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan *sosiolegal research* dan bersifat deskriptif, teknik pengambilan sampling dalam

bentuk purposif dan penentuan responden dengan menggunakan “*Snowball Sampling*” jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif dalam bentuk data primer dengan tidak mengeyampingkan data sekunder. Data primer di peroleh dari responden di lokasi penelitian sedangkan data sekunder diambil peraturan – peraturan, dokumen makalah seminar, tambo dan sejenis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi oleh masyarakat adat alasannya sangat sederhana yaitu uang hasil penjualan tanah pusaka dibagi – bagikan pada anggota kaum untuk dijadikan modal usaha dan terserah anggota kaum dan daripada menimbulkan masalah dikemudian hari bagi anak kemenakan lebih baik dijual. Begitu juga pola peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi itu begitu mudah hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki mamak kepala kaum dan anggota kaum cukup memberi persetujuan kepada mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusakanya. Kadangkala diikuti dengan pemalsuan tanda tangan anggota kaumnya oleh mamak kaum.

Dampak dari penjualan tanah pusaka tersebut yaitu disisi lain pembangunan kota pesatnya sehingga sawah dan ladang telah berubah menjadi komplek perumahan dengan bangunan yang megah. Sedangkan disisi lain anggota kaum pemilik tanah semula menjadi terpinggir dan tergusur dari kampung halamannya sendiri, malah ada yang menyewa rumah di daerah lain yang rendah sewa rumahnya.

Tanggapan pemerintah kota terhadap banyaknya tanah pusaka yang dijual oleh persekutuan adat akibat dari pembangunan hal ini sangat memprihatinkan pemerintah daerah meskipun pemerintah daerah Sumatera Barat terlambat mengantisipasi eksese dari pembangunan kota dengan adanya undang – undang No. 22 tahun 1999 memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali pranata sosial yang selama ini terabaikan.

Dalam analisis penulis mengkaji alasan dari persekutuan adat menjual tanah pusakanya ada 2 alasan :

1. Alasan Internal, yaitu :
  - a. Alasan Ekonomi, dengan menjual tanah pusaka tersebut dapat di jadikan modal usaha.
  - b. Alasan tanggungjawab moral anggota kaum terhadap hutang mamak bapak kaum, karena adanya rasa sehina – semalu menuntut adat.
2. Alasan Eksternal, yaitu : pemerintah dalam menjalankan program pembangunannya dengan mengeluarkan peraturan untuk pembangunan perumahan, yang menyebabkan meningkatnya harga tanah, hal ini mendorong mamak dan anggota kaum untuk menjual tanahnya tanpa mengidahkan ketentuan adat.

Kesimpulan : pesatnya pembangunan perumahan di kota Padang akan selalu berhadapan dengan tanah pusaka tinggi / pusaka kaum, karena pada umumnya tanah di Kota Padang adalah tanah hak milik adat. Dimana peralihannya menurut hukum adat sangat sulit sekali sebab harus memenuhi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Ahmadi, "**Ilmu Sosial Dasar .**" Bina Aksara, Jakarta 1988
- Chairul Anwar, "**Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau.**" Rineka Cipta , Jakarta 1997
- Darman Munir, Drs., **Tambo Adat Alam Minangkabau.**
- George Ritzer, "**Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.**", Rajawali Pers, Jakarta
- Hamzah Andi, Suandra I Wayan, Manulu BA "**Dasar-Dasar Hukum Perumahan**" Rineka Cipta Jakarta Agustus 1990.
- Hermayulis, "**Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat**", Disertasi, UI, Jakarta 1999, hal 165-170.
- Dt. Rajo Penghulu Idrus Hakimi, "**Rangkaian Mustiaka Adat Bersandi Syarak di Minangkabau.**" Remaja Rosda Karya, Bandung 1997
- Moeloeng, Lexy J, "**Metodologi Penelitian Kualitatif**", Bandung Remaja Rosdakarya, 1994.
- Magnis Frans – Suseno, "**Kuasa dan Moral .**" Gramedia, Jakarta 1995
- Naim Mochtar, "**Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau**" Sri Darma NV, Padang, 1968.
- OK Chairuddin, "**Sosiologi Hukum**" Sinar Grafika, Jakarta
- Rahardjo Satjipto, "**Hukum dan Masyarakat .**", Angkasa, Bandung 1986
- Rahardjo Satjipto, "**Ilmu Hukum.**", Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 207
- Seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris Minang Kabau di Padang 1968 dan di Jakarta 1983.**
- Soemitro Irma Setyowati, SH, "**Beberapa Aspek Kewarisan pada Kekerabatan Matrilineal .**" Badan Penerbit UNDIP 1994
- Soekanto Soerjono, "**Pokok – Pokok Sosiologi Hukum.**" Rajawali Press 1988
- Sanapiah Fasal, "**Penelitian Kualitatif.**", Yayasan Asah Asih Asuh
- Thalib Sajuti, "**Hubungan Tanah Adat dan Hukum Agraria di Minang Kabau**", Bina Aksara, Padang, 1985.
- Tasririf Ali Umar , Faisal Hamdan, "**Lingkungan Tanah di Sumatera Barat .**" 1997
- Wignjodipoero Soerojo, SH, "**Pengantar Azas-Azas Hukum Adat**", CV. Haji Masagung Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

UU Pokok Agraria Indonesia UU No. 5 Tahun 1960.

Keppres No. 35 Tahun 1974 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1987.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 02 / KPTS / 1990.